BERPIJAK PADA REALITAS

TANTANGAN BAGI PASTORAL, MISIOLOGI
DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Dr. Raja Oloan Tumanggor lahir 14 April 1967 menyelesaikan S1 Filsafat di Fak. Filsafat Universitas Katolik St. Thomas Medan (Sumut) pada 1993. Setelah meraih S3 bidang teologi dari Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster Jerman 2006, mengajar misiologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (2007-2011) dan sejak 2012 menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta untuk mata kuliah Filsafat. Karya tulis, a.l. *Inkulturation des Glaubens aus einer indonesischen Perspektive* (Herder, 2005), *Logika Sebuah Pengantar* (Pustaka Mandiri, 2012)

Teologi harus berpijak pada persoalan sosial kemasyarakatan. Pijakan pada fakta/realitas akan menghasilkan solusi yang relevan dan dinamis. Setiap warga harus peka mengamati dan menganalisa segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti kemiskinan, krisis pangan, anak jalanan dan persoalan-persoalan lainnya. Situasi konkret yang beragam menjadi *locus theologicus* yang mumpuni. Dan, keadaan di lapangan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para pelaku/petugas/pelayan pastoral dan juga para (calon) misionaris. Kiranya apa yang dipaparkan dalam buku ini dapat membantu pembaca dalam membumikan pesan Sang Juruselamat, yaitu mewartakan Kerajaan Allah di dunia. Kiranya butir-butir pesan yang tersirat dan tersurat dalam tulisan ini bagaikan mosaik, yang walaupun terdiri atas beragam tema tapi dapat dirangkai menjadi sebuah figura refleksi nan indah.

Penerbit

Genta Pustaka Lestari

Jl. Kampung Utan Bahagia No 50 RT 10/RW 4

Cengkareng - JAKARTA 11730 INDONESIA

E-mail: gentapustakalestari@gmail.com

http://www.gentapustakalestari.wordpress.com

ISBN 9786027022225

9 786027 022225

DR. RAJA OLOAN TUMANGGOR

BERPIJAK PADA REALITAS

DR. RAJA OLOAN TUMANGGOR

**BERPIJAK PADA REALITAS
TANTANGAN PASTORAL, MISIOLOGI
DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN**

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BERPIJAK PADA REALITAS

TANTANGAN BAGI PASTORAL,

MISIOLOGI DAN

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

DR. RAJA OLOAN TUMANGGOR

**PENERBIT
GENTA PUSTAKA LESTARI**

BERPIJAK PADA REALITAS

Tantangan bagi Pastoral, Misiologi dan
Pendidikan Agama Kristen
(c) 2013 Genta Pustaka Lestari

PENERBIT

GENTA PUSTAKA LESTARI

Jl. Kampung Utan Bahagia No 50 RT 10 RW 4
Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
JAKARTA 11730, INDONESIA
Telepon: 0878-75095479
E-Mail: gentapustakalestari@gmail.com
<http://www.gentapustakalestari.wordpress.com>

Desain isi : Tim GPL
Desain cover : Paulinus Haryo Buntoro Tulasi

ISBN 978-602-70222-2-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kupersembahkan

*Untuk isteriku Lucia Teriana Milarca dan anak-anak
kami Ludgerius Maruli Nugrobo Tumanggor dan Felicitas
Adelita Permatasari Tumanggor*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	9
Bagian I Persoalan Sosial Kemasyarakatan	11
1. Kemiskinan dan Kesetiakawanan Sosial.....	13
2. Krisis Pangan dan Mentalitas Kekuasaan.....	17
3. Kontroversi RUU Pornografi.....	21
4. Penanganan Integratif Anak Jalanan	25
Bagian II Pastoral dan Misiologi.....	29
5. Hubungan Teologi Akademis dan Pelayanan Gereja.....	31
6. Tantangan Pastoral atas Fenomena Begu Ganjang.....	41
7. Spe Salvi dan Kita	47
8. Analisis Kurikulum Program Studi S1 Misiologi.....	51
Bagian III Masalah Pendidikan dan Penyuluhan	
Agama Kristen	73
9. Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Berbasis KTSP Tinjauan Teologis.....	75
10. Pemanfaatan TIK dalam PAK.....	89
11. Penyuluhan Agama dalam Konteks Masyarakat Multikultural.....	103
Biodata Penulis.....	127

KATA PENGANTAR

Teologi harus berpijak pada persoalan sosial kemasyarakatan. Pijakan pada fakta/realitas akan menghasilkan solusi yang relevan dan dinamis. Setiap warga harus peka mengamati dan menganalisa segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti kemiskinan, krisis pangan, anak jalanan dan persoalan-persoalan lainnya. Situasi konkret yang beragam menjadi *locus theologicus* yang mumpuni. Dan, keadaan di lapangan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para pelaku/petugas/pelayan pastoral dan juga para (calon) misionaris, sehingga mereka yang baru bergabung dealam keluarga kristen dapat mempersiapkan diri dalam institusi pendidikan.

Salah satu kepedulian pimpinan gereja dalam mengantisipasi situasi yang terjadi dalam masyarakat adalah menyusun sebuah seruan dalam bentuk ensiklik seperti yang dilakukan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam *Spe Salvi*. Selain itu para mahasiswa dan dosen teologi juga ditantang untuk memperhatikan hubungan teologi akedemis dan pelayanan pastoral gereja. Artinya, apa yang diajarkan/direfleksikan di bangku kuliah sungguh-sungguh relevan dengan dan nyata dalam pelayanan gereja.

Secara khusus hal itu menjadi lebih mendesak lagi bagi para ujung tombak seperti para pendidik/penyuluh agama di tengah-tengah jemaat dan masyarakat pada umumnya. Para pendidik/pengajar agama di sekolah perlu memperhatikan tujuan kurikulum. Dan, apa yang digariskan dalam kurikulum dapat dikonkritkan dalam pengajaran. Hal itu kemudian menjadi lebih efektif lagi bila turut memperhatikan dampak/manfaat positif dari teknologi informasi dan komunikasi.

Semua ini menjadi satu kesatuan dalam buku ini. Kiranya apa yang dipaparkan dapat membantu pembaca dalam membumikan pesan Sang Juruselamat, yaituewartakan Kerajaan Allah di dunia.

Kiranya butir-butir pesan yang tersirat dan tersurat dalam tulisan ini bagaikan mosaik, yang walaupun terdiri atas beragam tema tapi dapat dirangkai menjadi sebuah figura indah. Dan keanekaragaman melodi dalam setiap tulisan dapat dipadukan, sehingga menghasilkan sebuah simfoni indah.

Buku ini adalah bunga rampai dari tulisan yang pernah diterbitkan dalam berbagai media dan bahan seminar yang dipresentasikan dalam kurun waktu 2008 hingga 2010 yang lalu. Ada juga beberapa tulisan yang memang baru kali ini dipublikasikan.

Karya kecil ini saya persembahkan kepada isteriku Lucia Teriana Milarca dan anak-anakku Ludgerius Maruli Nugroho Tumanggor (Gery) dan Felicitas Adelita Permatasari Tumanggor (Lita) yang dengan penuh kesetiaan mendorong saya untuk terus berkarya. Tidak ada gading yang tak retak. Segala komentar, kritik yang membangun dari sidang pembaca saya terima dengan senang hati. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa memberkati kita agar kita mampu berpijak dalam realitas, karena memang disanalah Tuhan hadir mewahyukan diriNya.

Jakarta, Desember 2013
Raja Oloan Tumanggor

Bagian I
Menilik Masalah Sosial
Kemasyarakatan

1.

KEMISKINAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Menurut Bank Dunia, bila mengikuti standar internasional pendapatan 2 dollar AS per hari, setidaknya 49 persen dari 250 juta penduduk Indonesia kini hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka inilah kelompok yang belum memperoleh hak yang layak akan pangan, sandang, tempat tinggal, lapangan kerja, kesehatan dan pendidikan. Ini baru disorot dari aspek kemiskinan, belum pelanggaran hak asasi ekonomi lainnya. Banyak masyarakat menderita kemiskinan akibat ketidakadilan dan salah urus dari berbagai pihak yang tidak sanggup mengelola ekonomi secara memadai.

Siapakah yang paling bertanggungjawab mengatasi persoalan kemiskinan? Apakah itu hanya tanggungjawab pemerintah dan pengusaha? Atau malah tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali? Seorang pejabat dari salah satu departemen di negeri ini pernah mengatakan, sebagai wujud kesetiakawanan sosial perlu keterlibatan para pengusaha membantu mengentaskan kemiskinan di sekitar industri dan pabrik. Penanggulangan kemiskinan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah lewat berbagai departemen, tapi juga membutuhkan keterlibatan para pengusaha (bdk.Kompas, 13/12-2006).

Namun sayangnya, keterlibatan para pengusaha melalui program yang disebut ‘tanggungjawab sosial perusahaan’ (*corporate social responsibility/CSR*) tidak jarang hanya menjadi ajang cari muka perusahaan. CSR tidak lebih sebagai bentuk tindakan amal, *charity*, yang tergantung pada niat baik perusahaan semata, yang hanya dilakukan bila perusahaan mendapat keuntungan.

Persoalan lain lagi adalah, bukan bahwa pengusaha tidak bersedia mengalokasikan dana untuk kaum miskin di sekitarnya, tapi para pengusaha sebelum memulai usahanya sudah mengeluarkan banyak dana untuk memperlancar urusannya terhadap pejabat tertentu. Bukan itu saja, mereka juga harus memikirkan dana untuk setoran secara teratur atau ‘uang keamanan’ demi menjaga kelangsungan usahanya. Akibatnya, perusahaan merugi dan tidak punya dana lagi membantu masyarakat miskin.

Kalau demikian halnya, bagaimana harus diwujudkan kesetiakawanan sosial itu? Dalam pengertian sehari-hari orang sering memahami kesetiakawanan dalam bentuk pemberian sesuatu, seperti amal, derma, bantuan, dan program-program hebat. Orang masih jarang memahami kesetiakawanan dalam bentuk permenungan dan refleksi diri, khususnya bagi pemimpin bangsa dan penentu kebijaksanaan politik dalam mengelola bangsa ini.

Karena itu beberapa pertanyaan berikut barangkali menjadi relevan bila dikaitkan dengan praksis kesetiakawanan sosial. Bukankah juga bentuk kesetiakawanan sosial bila pemerintah dan pejabat terkait tidak menuntut dana khusus dari para pengusaha di luar ketentuan yang sudah berlaku, sehingga dana itu bisa sungguh-sungguh dialokasikan bagi pemberdayaan kaum miskin di sekitar pabrik dan industri? Bukankah juga merupakan perwujudan kesetiakawanan sosial bila para pejabat dan pengambil keputusan mengambil keputusan yang sungguh-sungguh berpihak kepada orang kecil dan miskin? Bukankah juga bentuk kesetiakawanan sosial bila mental korup yang sudah parah bisa dihilangkan, atau pikiran yang berencana akan korupsi membatalkan niatnya, sehingga uang dan kas negara bisa lebih efisien dimanfaatkan untuk kepentingan kaum miskin? Bukankah juga merupakan perwujudan kesetiakawanan sosial bila birokrasi pemerintahan juga mereformasi diri dengan mengikis habis praktek korupsi, kolusi dan nepotisme?

Yang sering kita dengar adalah orang miskin menjadi objek semata. Mereka dijadikan objek proyek oleh kelompok tertentu kepada

negara donor untuk mendapatkan bantuan, padahal dana itu digunakan bukan untuk kaum miskin, tapi untuk memperkaya diri dan kelompok sendiri. Orang miskin juga dijadikan objek penelitian dan menjadi pihak yang perlu dikasihani dan dilindungi. Mereka menjadi objek yang menerima belas kasih, dan lain sebagainya. Kapanakah mereka dijadikan subjek pembangunan? Kapanakah orang miskin dijadikan subjek pemberdayaan dan pembelajaran?

Kenyataannya, banyak hal dapat dipelajari dari orang miskin, khususnya menyangkut kesetiakawanan sosial. Coba kita lihat kesetiakawanan di antara orang yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang ojek, pemulung, dll. Kendati kemiskinan mendera, mereka dapat saling membantu rekannya yang berkekurangan. Ternyata orang miskin itu memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Bukankah justru itu yang perlu dipelajari?

Tugas kita dalam mewujudkan kesetiakawanan sosial ini bukan hanya dalam bentuk memberikan “ikan” dan “kail” kepada orang miskin, tapi yang jauh lebih penting adalah mengakui eksistensi mereka sebagai manusia, yang bukan hanya menjadi korban ‘program pembangunan’, tapi melibatkan mereka dalam kebijakan publik. Memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.

Selain itu, hal yang perlu direnungkan adalah apa yang menyebabkan jumlah orang miskin di Indonesia terus meningkat? Tentu saja banyak faktor yang menjadi penyebabnya, termasuk situasi ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah yang kurang mengayomi kepentingan rakyat kecil, tapi lebih pada kepentingan kekuasaan.

Masalah kemiskinan terkait dengan ketidakadilan khususnya di bidang ekonomi yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Kita sebagai warga dalam masyarakat bangsa perlu menyatukan persepsi dalam membangun kesetiakawanan sosial. Pemerintah sebagai institusi diciptakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Tanpa mau memusuhi para pengusaha khususnya perusahaan transnasional (*multinational companies/MNCs*) sebagai aktor utama

globalisasi, nasib bangsa ini tidak bisa diserahkan kepada mereka. Karena kemampuan masyarakat tidak sama untuk bersaing dan karena akses tidak selalu cukup terbuka kepada semua orang, maka bangsa ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar dengan segala kecanggihan dan kekejamannya.

Maka, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan kiranya bisa menjadi bahan permenungan bersama. *Pertama*, pemerintah sebagai petugas utama menyejahterakan seluruh masyarakat, harus terus menerus memikirkan ulang dan mengambil langkah-langkah yang berpihak kepada rakyat kecil dan miskin, baik dalam hukum perundang-undangan maupun dalam relasi dengan dunia internasional. *Kedua*, di saat pemerintah dan pengusaha belum secara memadai memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan bersama, semua lapisan masyarakat khususnya kaum miskin dan tertindas mesti menggalang kemampuan, karena merekalah akhirnya yang bertanggungjawab atas kesejahteraan itu.

2. KRISIS PANGAN DAN MENTALITAS KEKUASAAN

Terjadinya lonjakan harga-harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini sungguh menyengsarakan sebagian besar rakyat negeri ini. Kenaikan harga memang sudah terasa sejak tiga bulan terakhir, tapi lonjakan harga di hampir semua jenis makanan utama terasa semakin hebat sejak awal Januari 2008 ini.

Akibat kenaikan harga yang berlipat-lipat itu banyak orang tidak sanggup lagi membeli kebutuhan sehari-hari. Penduduk di Cirebon, misalnya, terpaksa memakan nasi aking, karena tidak sanggup lagi membeli beras. Warga Tegal memakan ubi sebagai pengganti nasi. Warga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, malah mesti merobah kebiasaan dengan hanya makan dua kali sehari (*Kompas*, 25/1).

Yang paling memilukan lagi, seorang nenek di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, sampai nekat mencuri susu SGM dari sebuah super market karena tidak tega melihat cucunya yang terus menerus menangis kelaparan (*Kompas*, 25/1). Dan hal itu terjadi bukan hanya di Jawa tapi barangkali juga di daerah-daerah lain di Indonesia.

Inilah sebagian potret situasi masyarakat kita saat ini. Setiap hari kita akan berhadapan dengan berita-berita memilukan seperti itu di media massa. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di awal 2008 ini malah sudah mencapai 200-400 persen dibandingkan dengan empat tahun yang lalu ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengawali pemerintahannya.

Lalu bagaimana bisa dikatakan pemerintahan ini sukses bila rakyat kelaparan? Bagaimana bisa dikatakan pemerintahan ini berjalan bagus bila rakyat bukannya makin sejahtera, aman dan hidup layak,

tapi makin melarat? Kadang banyak rakyat kecil (dan juga kalangan tertentu) ingin kembali ke suasana saat Orde Baru masih berkuasa. Seorang ibu yang ikut menyaksikan iring-iringan jenazah mantan Presiden Soeharto di bilangan Cawang Atas, Jakarta Timur, 28 Januari lalu, misalnya, dengan isak tangis mengakui betapa hidupnya makin sulit saat ini. Dia mengaku tidak pernah harus antri membeli minyak, beras dan makanan kebutuhan pokok lainnya saat mantan presiden yang dikaguminya itu masih berkuasa.

Kondisi sulit saat ini tentu terasa makin mencekik khususnya bagi mereka yang berpenghasilan paspasan atau yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Konon pengusaha-pengusaha kecil telah banyak yang gulung tikar karena tidak memiliki modal usaha lagi. Pengusaha tempe terpaksa menaikkan harga jualannya agar tidak bangkrut berhubung melambungnya harga kedelai. Masyarakat mesti antri berjam-jam membeli beras dan minyak.

Menyikapi masalah ini pemerintah kelihatannya bertindak agak lamban. Usaha yang dibuat paling dengan mengandalkan impor untuk menstabilisasi harga seperti yang dilakukan dengan persoalan kedelai. Bangsa kita dengan tanah luas dan subur tidak sanggup menyediakan kedelai sendiri, sehingga harus mengimpor. Lebih ironis lagi, Indonesia yang punya lahan pertanian luas mesti mengimpor beras dari negara lain. Hal ini disebabkan karena penghargaan pemerintah terhadap para petani di negeri ini hampir tidak ada. Maka, petani yang seharusnya menjadi motor penggerak swasembada beras menjadi miskin dan melarat.

Namun, persoalan yang krusial sekarang ini adalah bahwa kenaikan harga sudah merambat ke hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini sebetulnya pemerintah tidak boleh bertindak lamban karena menyangkut azas hidup orang banyak. Persoalan sekarang mesti ditanggapi dengan serius karena menyangkut masalah kebutuhan mendasar. Pemerintah perlu segera membuat kebijakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi krisis harga kebutuhan pokok

ini. Bagaimana orang bisa memperhatikan hal lain kalau persoalan dasarnya belum terselesaikan?

Memang menyedihkan, di tengah situasi krisis multidimensional yang membuat rakyat makin sengsara, malah para elite politik terus membangun mentalitas kekuasaan dengan sibuk memasang kuda-kuda menghadapi pemilu 2009 mendatang. Para calon penguasa dan ‘raja-raja’ kecil di daerah sibuk menabur janji kepada rakyat lewat kampanye di Pilkada. Mereka asyik memasang segala strategi untuk merebut, melanggengkan dan memepertahankan kekuasaannya.

Sebetulnya, yang dibutuhkan rakyat saat ini kesejahteraan, keadilan, rasa aman, lebih konkrit lagi makanan, bukannya janji-janji kosong dan kebijakan yang malah merugikan sebagian besar rakyat kecil.

Pemerintah, cepatlah bergerak! Persoalan ini mesti segera diatasi sebelum rakyat kehilangan kesabaran, kepercayaan dan menggugat karena kalaparan. Kaum muda, khususnya para mahasiswa, dapat menjadi agen-agen pembaharu dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kecil dan miskin yang kelihatannya telah tenggelam ditelan gemuruh ombak perebutan kekuasaan para elite politik.

Sekarang ini rakyat perlu makan, butuh rasa aman dan ingin sejahtera. Karena itu, para pelaku ekonomi, tokoh-tokoh politik dan pemegang tampuk pemerintahan perlu bahu membahu mengatasi persoalan ini. Redamlah nafsu memperkaya diri dan berpihaklah pada kepentingan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada Anda untuk membangun negeri ini.

3.

KONTROVERSI RUU PORNOGRAFI

Ketika muncul informasi bahwa pada tanggal 23 September 2008 mendatang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi direncanakan akan disahkan dalam sidang paripurna DPR menjadi undang-undang, gelombang protes muncul lagi di masyarakat (*detikNews* 16/9/2008). Hal itu memang beralasan, karena RUU Pornografi yang semula di bernama RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP) ini sudah sejak awal peluncurannya pada 14 Februari 2006 lalu menuai banyak protes dari para akademisi, budayawan, LSM Perempuan, seniman, serta berbagai kelompok masyarakat lain, dan sempat menghilang dari peredaran dan pemberitaan di media massa, namun tiba-tiba mau diundangkan tanpa memberikan kesempatan lebih luas lagi untuk diperdebatkan. Padahal, produk hukum yang mengatur kehidupan orang banyak mesti diberikan kesempatan debat publik, tidak hanya ditentukan oleh sekelompok orang yang mencari kesempatan dalam kesempatan.

Yang menjadi persoalan fundamental dan kontroversial dalam RUU ini sejak awal kemunculannya, *pertama* adalah definisi pornografi itu sendiri yang tidak begitu gampang dalam membuat batasannya. *Kedua*, dari segi substansi RUU Pornografi yang kini tinggal 8 bab dan 44 pasal ini masih juga mengandung kalimat dan kata-kata ambigu yang kurang jelas dan memang tidak bisa dirumuskan secara absolut, misalnya: erotis, kecabulan, eksploitasi seksual, ketelanjangan, gerakan menyerupai hubungan seksual, dll. *Ketiga*, mencegah dan menghentikan pornografi melalui sebuah undang-undang dapat berakibat pada kekerasan negara dalam mengatur moral warga negara Indonesia secara pukul rata. Padahal masalah moral lebih pada persoalan pribadi masing-masing warga masyarakat.

Polemik

Memaksakan sebuah RUU yang masih mengandung polemik dan memiliki banyak kelemahan menjadi undang-undang yang mengikat dan mengatur hidup seluruh lapisan masyarakat jelas merupakan sebuah bentuk tindakan yang tidak bijaksana. Pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas lewat film, buku, majalah, dan lain-lain yang menjadi-jadi sekarang ini memang harus diberantas. Namun tidak mesti melalui undang-undang segala. Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang bisa mengaturnya, hanya belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten oleh aparat negara dan penegak hukum.

Bila RUU Pornografi ini jadi diundangkan, berarti setiap warga negara Indonesia dan orang yang ada di Indonesia menyerahkan persoalan mo-ral dan etikanya dicampuri oleh negara. Padahal, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya memiliki konsep moral dan etika yang berbeda-beda misalnya mengenai tata susila, dan cara berpakaian. Karena itu RUU ini sungguh menciderai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang kita junjung bersama. Sebuah produk undang-undang mestinya melindungi seluruh warga masyarakat, bukannya membatasi ruang gerak, apalagi menyeragamkan konsep moral dan etika bagi seluruh masyarakat yang memiliki budaya yang heterogen.

Selain itu, RUU Pornografi ini beranggapan bahwa yang menjadi sumber kerusakan moral adalah tubuh kaum perempuan yang tidak bertingkah laku sopan. Seksualitas dan tubuh perempuan dinilai kotor, merusak moral, dan karena itu sebagai penyebab pornografi. Hal ini dapat menyudutkan dan menempatkan perempuan sebagai objek dan pihak yang bersalah. Padahal, sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh merugikan dan menjadikan sekelompok masyarakat sebagai objek semata. Undang-undang seharusnya justru membela dan memperjuangkan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Wilayah privat

Yang jelas, RUU Pornografi bisa mengekang kebebasan pribadi seseorang, karena negara mengatur wilayah privat penduduknya seperti masalah seksualitas. Isu seksualitas dikerangkeng hanya menjadi persoalan pornografi semata. Karena itu, bila RUU ini jadi diundangkan, sepasang suami isteri yang menyimpan pornografi kendati hanya untuk kalangan sendiri dapat dijerat pasal-pasal undang-undang ini. Seseorang yang memakai kebaya yang sedikit terbuka di bagian dadanya pada waktu resepsi pernikahan dapat dikenakan sanksi, karena dilakukan bukan pada kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Atau seorang perempuan yang mengenakan celana pendek saat lari pagi di jalan akan dididuk, karena dilakukan tidak di gedung olah raga, maka dinilai melanggar hukum. Dan, banyak tindakan lain lagi yang sebenarnya wajar di tengah masyarakat, tapi bisa dikenai hukuman berkat “jasa” RUU Pornografi ini. Itukah undang-undang yang seharusnya melindungi masyarakat?

Jadi, RUU yang masih mengundang kontroversi tidak boleh dipaksakan menjadi undang-undang hanya karena kepentingan politik tertentu semata. Masih banyak persoalan pelik dan mendesak bangsa ini yang bisa didiskusikan dan perlu dicari solusinya, misalnya masalah pemberantasan kemiskinan, perjuangan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi yang makin merajalela dan mengakibatkan kesengsaraan banyak orang, tapi memperkaya segelintir orang, dll. Para wakil rakyat (dan kita semua) seharusnya menghabiskan energi untuk mengatasi persoalan itu, bukan semata-mata hanya menggolkan RUU yang sebenarnya masih kontroversial dan membutuhkan debat publik lebih lanjut.

4. PENANGANAN INTEGRATIF ANAK JALANAN

Peristiwa pembunuhan sadis dengan cara mutilasi oleh “Babeh” terhadap belasan anak di bawah umur telah menjadi berita hangat dan mengingatkan kita betapa penanganan anak jalanan butuh perhatian serius seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah khususnya. Kejadian ini melahirkan banyak pertanyaan seputar nasib anak jalanan yang kerap menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan sungguh terpinggirkan.

Sebetulnya, anak-anak yang turun ke jalan tidaklah sesuai dengan keinginannya, kalau bukan karena terpaksa. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan. Yang paling umum adalah alasan ekonomi. Kemiskinan yang melilit orang tua menyebabkan anak-anak turun ke jalan guna menopang kehidupan ekonomi keluarga, karena di jalanan mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah lewat mengemis atau mengamen.

Ketidakmampuan orangtua dan pemerintah memenuhi hak anak memperoleh nafkah dan pendidikan, menjadikan anak yang seharusnya masih melanjutkan pendidikan, harus turun tangan menopang kelangsungan hidup ekonomi keluarga.

Selain faktor kemiskinan, termasuk juga keretakan rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Hal ini menyebabkan perhatian pada kelangsungan hidup dan masa depan anak terabaikan oleh pihak yang bertikai. Kurangnya perhatian orangtua menyebabkan anak-anak mencari tempat yang lebih nyaman di antara rekan sebayanya dan hidup bebas di jalanan. Situasi bebas seperti ini tentu amat beresiko bagi keamanan anak jalanan.

Minimnya kasih sayang dari keluarga membuat anak mencari

figur pelindung dan pengayom di antara rekan-rekannya yang hidup di jalanan. Anak-anak cepat menaruh kepercayaan kepada orang yang mendampingi mereka. Namun sayang, keadaan ini kerap juga dimanfaatkan oleh orang yang memiliki kelainan seksual atau phedofilia seperti “Babeh” dengan kedok sebagai “pengayom” untuk mencari mangsa di antara anak jalanan.

Kehadiran mereka di jalanan sungguh membuat hati iba, tetapi sekaligus cemas melihat segala resiko yang mereka hadapi. Kondisi fisik yang lemah memungkinkan mereka bisa dieksploitasi oleh sesama rekannya yang lebih dewasa. Ironisnya, keberadaan mereka di jalan raya juga kerap dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga tidak jarang mereka dirazia oleh aparat satuan kepolisian (satpol) pamong praja.

Payung hukum dan perundang-undangan yang mengatur penanganan anak-anak jalanan di negeri ini sebetulnya sudah ada. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 dikatakan “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.” Selain itu ada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 59 menyangkut anak yang perlu perlindungan khusus. Untuk mewujudkan amanat itu di tingkat nasional dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemerintah melalui Departemen Sosial juga telah berusaha melakukan penanganan. Selain itu ada juga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menaruh minat pada perlindungan anak jalanan.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada usaha yang telah dilakukan berbagai pihak, suatu kenyataan yang jelas tampak di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan anak-anak jalanan bukan berkurang, melainkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Mengapa bisa demikian? Ada apa dengan penanganan anak jalanan selama ini?

Secara spontan barangkali kita menarik kesimpulan, bahwa kemiskinan yang semakin meningkat menyebabkan banyak keluarga

miskin tidak mampu memberi jaminan ekonomis kepada anak-anaknya. Usaha penanganan jauh lebih kecil dibanding kemiskinan yang terus meningkat. Inilah satu-satunya penyebab makin menjamurnya anak jalanan?

Tanpa mengabaikan faktor ekonomis, ada faktor lain yang justru memiliki pengaruh besar. Yaitu, faktor kebijakan dan pola penanganan. Dari sisi ini terdapat beberapa aspek yang membuat penanganan anak jalanan belum maksimal.

Pertama, penanganan masih bersifat reaktif dan sektoral. Pendekatan ini menjadikan anak-anak sebagai obyek penanganan semata. Hal ini terlihat lewat razia aparat keamanan terhadap anak jalanan karena dianggap mengganggu ketertiban umum, atau anak jalanan dikumpulkan dan dibina di rumah-rumah penampungan. Yang lebih ekstrim adalah menjebloskan anak jalanan yang berbuat kriminal ke penjara dengan harapan memiliki efek jera.

Dengan dalih ‘demi kepentingan umum’ anak jalanan dikorbankan. Padahal, menurut ketentuan konvensi Perseritakan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Anak, *Convention on The Right of Children* (CRC) yang telah diratifikasi 192 negara (termasuk Indonesia), razia anak jalanan, pengadilan anak dan memenjarakan anak adalah suatu bentuk pelanggaran. Malahan tahun yang lalu Indonesia telah dituduh PBB melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini (*Surya*,6/3/09).

Kedua, penanganan berorientasi krisis dan proyek. Pendekatan ini juga menempatkan anak jalanan sebagai obyek berbagai institusi untuk proyek kegiatan mereka pada saat ada krisis. Fokus pada pendekatan ini bukan kepentingan dan pembinaan anak jalanan, melainkan kepentingan pelaksanaan program institusi dan upaya pengadaan proyek berikutnya. Cara seperti ini membuat pendampingan hanya bersifat sementara selama proyek berlangsung, padahal penanganan anak jalanan perlu dilakukan berkesinambungan.

Upaya apa yang bisa dilakukan untuk membenahinya?

Pertama, perlu dibuat suatu sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan integratif. Dalam sistem ini amanat UUD 1945 dan berbagai Undang-Undang sungguh bisa terimplementasi lewat berbagai institusi yang menangani anak.

Oleh sebab itu sistem yang jelas dasar hukum, dan pengelolaan secara institusionalnya akan membuat penanganan anak jalanan lebih sistematis, koordinatif dan terarah. Dengan demikian tidak ada lagi prinsip melempar tanggung jawab di antara lembaga dan institusi dalam menangani anak jalanan. Pendekatan yang bersifat reaktif/sektoral dan berorientasi pada krisis dan proyek sesaat perlu ditinjau kembali.

Kedua, membangun kerja sama yang harmonis antara pemerintah, lembaga sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, seperti misalnya LSM, yang menaruh minat pada anak-anak jalanan. Relasi yang terbangun hendaknya berbasis pada kebutuhan anak jalanan, bukan pada keinginan dan minat penentu kebijakan semata.

Ketiga, perlu penanganan masalah sosial anak jalanan dengan memperkuat peranan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi PBB menyangkut perlindungan dan pengasuhan anak. Karena itu, anak-anak jalanan terlebih dahulu diupayakan memperoleh perlindungan dari keluarga utama, kerabat, perwalian, atau orang tua angkat. Pemerintah dan lembaga sosial hendaknya menjadi fasilitator dalam merealisasikannya. Pembinaan anak jalanan di panti asuhan merupakan pilihan terakhir, bila penanganan berbasis keluarga tidak memungkinkan lagi, misalnya karena orangtua amat miskin, bercerai atau telah meninggal dunia.

Dengan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, anak-anak jalanan yang sedang bergulat mempertahankan hidup, diharapkan mampu memperoleh haknya dalam perlindungan, pendidikan dan kasih sayang, karena masa depan negeri ini juga dititipkan ke tangan mereka. Penanganan anak jalanan yang terpadu di antara pemerintah, lembaga sosial dan kemasyarakatan yang ditopang oleh hukum yang jelas, akan dapat menghindari jatuhnya banyak korban berikutnya oleh “Babeh-Babeh” lainnya di masa yang akan datang.

BERPIJAK PADA REALITAS

tantangan pastoral, misiologi dan pendidikan agama kristen

Bagian II

Pastoral dan Misiologi

5.

HUBUNGAN TEOLOGI AKADEMIS DAN PELAYANAN GEREJA

Pendahuluan

Sering terdengar komentar yang mengatakan bahwa institusi pendidikan seperti sekolah tinggi teologi (STT) cuma menghasilkan teolog-teolog akademis yang mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran teoretis analitis, namun tidak cukup kompeten dalam bidang karya pelayanan di jemaat atau gereja. Benar tidaknya anggapan ini tentu masih butuh penelitian dan pengamatan yang lebih seksama dan mendalam. Akan tetapi munculnya kesan tersebut sekurang-kurangnya menjadi momen penting untuk merefleksi bagaimana cara mengatasinya dan yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana merancang sebuah pendidikan teologi yang secara tepat bisa menghubungkan teologi akademis dan pelayanan gerejawi.

Apa itu teologi?

Sebelum sampai kepada pokok permasalahannya, perlu kiranya mengajukan pertanyaan, “Apakah itu teologi?” Secara sederhana semua pembicaraan yang menyadarkan manusia pada keberadaan manusia dan keberadaan Tuhan disebut *teologi*.¹ Namun, perlu diingat apa yang pernah dikatakan oleh Detrich Bonhoeffer bahwa pemikiran teologis tidaklah memiliki kebenaran kekal. Teologi adalah sarana bantu, sarana perjuangan, dan bukan tujuan pada dirinya sendiri. Teologi memiliki

1 Emmanuel Gerrit Singgih: *Berteologi dalam Konteks. Pemikiran-Pemikiran mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 133.

tempat, waktu dan fungsi. Teologi adalah pemahaman mengenai diri kita, kemanusiaan, ujian kritis atas relasi, dimana manusia hidup dan menderita, mencari kebenaran dan keadilan *hari ini*.²

Teologi adalah sarana bantu dimana orang bisa menyatakan pengalaman iman. Jadi teologi itu merupakan langkah kedua, iman yang direfleksikan (*fides reflexa*). Langkah pertama ialah pengalaman iman. Dalam pengalaman religius belum ada refleksi. Manusia dipaksa sebetulnya entah menyimpan sendiri pengalamannya atau membagikannya kepada orang lain. Dalam kaitan itu, teologi dipahami juga sebagai teori, artikulasi pengalaman religius.³

Untuk kepentingan pengajaran dan pertanggungjawaban pengalaman iman ini, para teolog kemudian membuat rumusan. Kegiatan ini tidak jarang adalah tanggapan dan jawaban mereka atas pergumulan pada situasi yang dihadapi. Kehebatan dan keberhasilan rumusan ini kerap membuat generasi berikut terus mempertahankannya, padahal mereka sudah memiliki situasi dan tantangan yang berbeda. Generasi baru itu berhenti pada rumusan lama, padahal tidak ada rumusan teologis yang baku dan bisa diterapkan sepanjang zaman tanpa upaya reinterpretasi.

Sikap yang terus mempertahankan rumusan lama seperti ini membuat orang menjadi amat defensif dan tidak mau terbuka lagi pada pemikiran dan refleksi baru. Bagi mereka teologi sudah selesai, tinggal dipelihara dan dibela mati-matian. Pihak yang mau mencoba merongrong rumusan lama mesti diwaspadai dan kalau perlu dijauhi.

Sebetulnya sikap seperti ini pernah dialami oleh hampir semua gereja dengan segala denominasinya. Pada awal dan pertengahan abad ke-20 masih tidak sulit menemukan gereja-gereja yang mendirikan lembaga pendidikan teologi untuk menghadapi aneka ragam tantangan berat waktu itu seperti ateisme, sekularisasi, modernisasi, dan

2 D. Bonhoeffer, *Oekumene*, Universitaet, Pfarramt 1931-1932, Guetersloh 1994, 332 seperti dikutip oleh Tiemo Rainer Peters, „Was ist Theologie“ dalam: Andreas Leinhaeupl-Wilke/Magnus Striet (Ed.): *Theologie. Orientierungen fuer Studium und Beruf* (Muenster-Hamburg-London: LIT-Verlag, 2000), h. 105.

3 D. Bonhoeffer, *ibid*.

kemajuan alat-alat teknologi. Dalam lembaga pendidikan teologi para mahasiswa dibekali pengetahuan teologi yang sudah baku guna menghadapi tantangan aktual saat itu. Dan, diupayakan agar bisa cepat dihasilkan pendeta-pendeta yang mampu langsung bekerja membimbing jemaat mengatasi persoalan yang ada. Demikian juga di lingkungan Gereja Katolik didirikan seminari-seminari tinggi untuk mencetak pastor-pastor yang siap diterjunkan ke masyarakat dengan segala permasalahannya. Mereka tentu dibekali pemikiran teologis tertentu yang sudah menjadi tradisi dan yang dirasa mampu menjawab segala persoalan yang ada di masyarakat. Untuk itu kurikulum pun disusun sesuai dengan kebutuhan. Tidak heran dari seluruh mata kuliah yang ada, mata kuliah yang berbau dogmatis amat dominan, karena perlu mempertahankan isi ajaran teologis yang dianut oleh gereja yang bersangkutan. Selain menyangkut pokok ajaran iman, para mahasiswa dibekali dengan ilmu bagaimana cara mengkomunikasikan ajaran iman itu lebih efektif dan berdaya guna melalui mata kuliah ilmu berkotbah (homiletika).

Yang menjadi kekhasan dalam cara menjelaskan ajaran teologis adalah mengungkapkan kelemahan ajaran gereja atau agama lain, baru kemudian menerangkan ajaran teologis sendiri. Dalam kondisi seperti ini bisa dibayangkan betapa sulitnya menjalin kerja sama ekumenis atau dialogis antar gereja atau umat beragama. Para mahasiswa memang diajari teologi, namun tidak mampu melahirkan pemikiran teologis atau tidak sanggup berteologi karena mereka sibuk mempertahankan pemikiran-pemikiran yang baku dan mungkin juga sudah usang.

Teologi jemaat dan teologi akademis

Pada paruh kedua abad ke-20 teologi sudah dibagi atas teologi jemaat dan teologi akademis. Teologi jemaat atau (meminjam istilah Robert Schreiter⁴) teologi lokal merupakan teologi hasil refleksi di kalangan jemaat lokal yang bersifat sederhana. Sementara teologi

4 Bdk. Robert Schreiter: *Rancang Bangun Teologi Lokal* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), h. 5-13.

akademis atau teologi profesional adalah teologi yang ada di kalangan lembaga pendidikan teologi. Dalam pengembangan teologi lokal, teolog profesional/akademis bertindak sebagai sumber penting, yang menolong komunitas atau jemaat memperjelas pengalamannya sendiri dan menghubungkannya dengan pengalaman jemaat-jemaat yang lain di masa lampau dan sekarang.⁵ Teolog profesional akademis mensistematisasi teologi jemaat lokal menjadi suatu teologi yang dapat dipelajari secara ilmiah.

Karena itu benarlah apa yang pernah dilontarkan oleh Karl Rahner, pada abad ke 20 ini masyarakat teologi (baik lokal maupun profesional) patut memberi perhatian pada pergeseran pertumbuhan gereja di Amerika Latin, Afrika, Asia dan Pasifik. Gereja mesti merobah cara pandang dunia yang umumnya helenistik ke dalam era gereja sedunia yang berciri pluralisme dengan masalah-masalah teologi baru.⁶ Dalam prakteknya, kedua jenis teologi ini (lokal dan profesional) sebenarnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Teolog profesional akademis memiliki peranan yang tidak bisa diabaikan, namun terbatas. Sang teolog tidak bisa menciptakan suatu teologi dalam keterasingan dari pengalaman komunitas jemaat. Sebaliknya komunitas jemaat itu sendiri membutuhkan pengetahuan sang teolog untuk mendasarkan pengalamannya di dalam tradisi-tradisi iman kristen. Dengan melakukan hal itu, sang teolog menolong menciptakan ikatan saling bertanggung jawab antara gereja jemaat setempat dan gereja sedunia.⁷

Kurikulum pendidikan teologi

Kalau pada awal abad 20 mata kuliah utama dalam kurikulum pendidikan teologi adalah dogmatik, maka pada paruh kedua abad 20 hingga kini mata kuliah utama ialah biblika. Pada periode sebelumnya memang dipelajari Alkitab sebagai Firman Tuhan, namun tujuan

5 Ibid., h. 33.

6 Karl Rahner, „Toward a Fundamental Interpretation of Vatican II,“ *Theological Studies* 40 (1979), h. 716-727 seperti dikutip oleh Robert Schreiter, *ibid.*, h. 1.

7 Robert Schreiter, *ibid.*, h. 33.

utamanya adalah sejauh mendukung rumusan ajaran dogmatis tertentu. Tafsiran diwarnai oleh ajaran teologis dogmatis tertentu. Karena itu dalam paruh kedua abad 20 pendidikan teologi menempatkan Alkitab di atas segalanya dan dalam kerangka itu metode historis kritis mendapat tempat khusus dalam kurikulum pendidikan teologi.⁸ Metode ini dapat menolong para mahasiswa teologi memahami lebih baik kekayaan pergumulan iman umat Israel dan umat kristen perdana. Sementara itu mata kuliah dogmatik dipelajari dalam konteks historisnya. Mahasiswa tidak hanya belajar isi dogma, tapi juga sejarah dogma dan alasan munculnya sebuah ajaran dogmatis.

Bagaimanakah kaitan teologi dengan disiplin ilmu lainnya? Ternyata, pergaulan dengan ilmu lain membuat teologi akademis makin diperkaya. Melalui pelajaran filsafat, misalnya, mahasiswa paham sejarah pemikiran filosofis suatu ajaran dogmatis. Lewat mata kuliah pastoral konseling orang bisa dibantu menyelesaikan persoalan hidupnya, karena tidak semua persoalan manusia bisa diselesaikan hanya secara spiritual, tapi juga secara psikologis. Maka, tidak heran dalam kurikulum pendidikan teologi dapat muncul mata kuliah seperti teologi dan psikologi, teologi dan komunikasi, teologi dan sosiologi, teologi dan sastra, dll.

Memang ada bahaya, pendidikan teologi akademis cenderung bersifat elit yang hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja. Ambil contoh mata kuliah biblika dengan metode historis kritis yang cukup rumit, sehingga orang bisa jatuh pada penelaahan yang berbau arkeologis. Akibatnya, kotbah bukan lagi refleksi religius, tapi berubah menjadi ceramah biblika. Bahaya lain ialah kemungkinan pendidikan teologi yang terlalu menonjolkan aspek kognitif, sehingga melalaikan aspek lain seperti afektif dan psikomotorik.

Mengatasi kesenjangan

Telah dikemukakan di atas bahwa teologi akademis profesional bertujuan menolong teologi komunitas jemaat, sehingga bisa

8 Bdk. E. G. Singgih, op. cit., h. 137.

mengartikulasikan argumentasi secara sistematis dan bertanggung jawab. Melihat situasi ini seharusnya tidak perlu terjadi kesenjangan antara teologi jemaat lokal dan teologi akademis. Namun, kadang kesenjangan tidak bisa dihindari. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara keduanya?

Untuk mengatasinya, mesti disadari bahwa teologi bukan saja harus akademis, tapi juga *kontekstual*, artinya mendarat pada konteks lokal. Teologi tidak hanya memberikan suatu pandangan intelektual yang bernalar, tetapi juga „dorongan akan sebetuk penataan hidup, dan oleh karenanya hal terbaik yang bisa dilakukan adalah pencarian akan cara hidup itu.“⁹ Perhatian untuk mengamalkan praktek hidup nyata sebagai titik awal refleksi teologis merupakan tanda menuju perubahan teologi yang lebih terkait dengan kehidupan jemaat/gereja. Banyak orang kristen di dunia ini merasa lelah, sehingga menjadi skeptis dengan teologi yang abstrak dan teoretis. Bagi mereka, pendekatan refleksi teologis dalam praktik hidup nyata sehari-hari membuka kemungkinan pada refleksi yang benar-benar bermakna dalam kehidupan gereja.

Selain itu, teologi akademis yang terlalu kuat pada dimensi intelektual mesti diimbangi dengan spiritualitas yang mengambil inspirasi pada kekayaan mistik lokal, dan juga melihat kembali teologi sebagai hal yang bersifat eksistensial dalam arti bersangkut paut dengan kehidupan dunia.¹⁰ Karena itu, mahasiswa perlu menguasai teologi yang bertolak dari konteks, sehingga mengetahui pergumulan lokal, baik di dalam jemaat maupun masyarakat. Dalam teologi akademis kontekstual, teologi jemaat mendapat tempat penting. Dalam kurikulum mata kuliah pastoral memiliki peran besar, karena dalam teologi ini hal pertama yang direfleksikan adalah proses yang terjadi dalam komunitas, dalam persekutuan orang beriman berhadapan

9 Miroslav Volf, „Theology for a Way of Life“, dalam Miroslav Volf dan Dorothy C. Bass (ed.): *Practicing Theology: Beliefs and Practices in Christian Life* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), h. 247.

10 Bdk. E. G. Singgih, op.cit., h. 142 – 143.

dengan realitas kesehariannya, serta diterangi oleh iman akan Allah Tritunggal. Yang menjadi sasarannya bukan hanya aspek intelektual manusia, tapi juga aspek afektif dan psikomotoriknya.

Arah baru teologi?

Lalu, bagaimanakah usaha yang bisa dilakukan agar teologi akademis berhubungan lebih nyata dengan kehidupan menggereja? Dalam pendidikan teologi perlu ada penekanan kuat bagi para mahasiswa untuk lebih terlibat dalam pelayanan gerejawi. Disini keterampilan berteologi dan kematangan kepribadian bisa terasah, sehingga akhirnya pada waktu mahasiswa menyelesaikan studinya, dia telah memiliki pengetahuan serta keterampilan berteologi, dengan kepribadian yang utuh melayani Tuhan dalam gereja dan masyarakat.

Secara lebih konkrit arah baru pendidikan teologi bisa dirumuskan dalam beberapa pokok pemikiran berikut. *Pertama*, atas dasar inkarnatoris teologi diberi wujud konkrit dalam kehidupan gereja, warga kristen dalam masyarakat. *Kedua*, atas dasar kerjasama, teologi bukan hanya sebatas *dimengerti* oleh jemaat, tapi suatu teologi yang muncul dalam karya partisipatif umat sendiri. *Ketiga*, pemikiran teologis bukan sebagai indoktrinasi, tapi bertujuan untuk merefleksi secara aktif, supaya teologi memiliki makna konkrit bagi realitas yang dihadapi saat ini. *Keempat*, teologi juga memiliki perspektif luas dan bebas, sehingga mampu bersikap kritis terhadap ajaran gereja dan praktek hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan profil berteologi seperti yang diuraikan diatas tentu dibutuhkan perubahan signifikan dalam pembentukan dan penyusunan kurikulum pendidikan teologi. Perspektif yang kiranya dapat menolong adalah bahwa studi teologi dilakukan karena memang memiliki kaitan dengan kenyataan hidup gereja dan masyarakat. Akhirnya mahasiswa bisa trampil atau kompeten bukan hanya berpikir, tapi juga berkarya dan hidup bersama secara kontekstual.

Tantangan serius bagi para pendidik, adalah apakah mereka mampu memberikan pemahaman teologis secara holistik bagi para mahasiswa, sehingga bisa nampak suatu perubahan sikap, perilaku dan performa dalam diri mahasiswa itu sendiri? Studi teologi juga mendorong tersedianya keterampilan mewujudkan iman di tengah konteks kehidupan gereja dan masyarakat. Semuanya ini bermuara pada praktek jemaat yang berkesinambungan dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan gerejawi, sehingga pergumulan teologis yang dialami di rumah pendidikan bisa mendarat dan mencerminkan kepedulian yang muncul di dalam jemaat. Namun, bagaimana pun juga mesti disadari apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer bahwa teologi tetap merupakan sarana bantu, sarana perjuangan dalam memahami diri kita, kemanusiaan, tinjauan kritis atas relasi dengan dunia, dimana manusia hidup dan menderita, mencari kebenaran dan keadilan. (***)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bonhoeffer, Dietrich: *Oekumene, Universitaet, Pfarramt 1931-1932*, Guetersloh, 1994.
- Peters, Tiemo Rainer: „Was ist Theologie“ dalam: Andreas Leinhaeupl-Wilke/Magnus Striet (Ed.): *Theologie. Orientierungen fuer Studium und Beruf*, LIT-Verlag, Muenster-Hamburg-London, 2000.
- Rahner, Karl: „Toward a Fundamental Interpretation of Vatican II,“ *Theological Studies* 40 (1979), h. 716-727
- Singgih; Emmanuel Gerrit: *Berteologi dalam Konteks. Pemikiran-Pemikiran mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- Schreiter, Robert: *Rancang Bangun Teologi Lokal*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1991.
- Volf, Miroslav/Bass, Dorothy C. (ed.): *Praticing Theology: Beliefs and Practices in Christian Life*, Grand Rapids: Eerdmans, Grand Rapids, 2002.

6. TANTANGAN PASTORAL ATAS FENOMENA BEGU GANJANG

Beberapa waktu yang lalu berkembang isu *begu ganjang* di Sumatera Utara, dan orang yang disangka memiliki *begu ganjang* diusir dari desa, malahan ada yang sampai dibunuh dan rumahnya dibakar. Fenomena tersebut membuat orang bertanya apakah *begu ganjang*, darimanakah asal-usul dan makna kata tersebut. Selain itu gejala ini menjadi tantangan serius bagi kehadiran kekristenan dalam karya pastoralnya di tengah-tengah jemaat.

Tulisan ini bukan bermaksud menjawab segala persoalan yang muncul sehubungan dengan *begu ganjang*, tapi hanya sebatas memberikan sedikit pemahaman terminologis dan sikap pastoral apa yang bisa dilakukan berhadapan dengan isu *begu ganjang*.

Secara sederhana dan harafiah *begu* sebetulnya berarti roh, sedangkan *ganjang* artinya panjang. Untuk memahaminya, *begu ganjang* mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas dari ‘teologi’ dan ‘agama’ tradisional suku Batak Toba sendiri, secara khusus paham ‘pneumatologi’ Batak Toba (*pneuma* = roh, spirit). Dari sudut pandang ilmu agama-agama dapat dikatakan bahwa dalam diri orang Batak Toba kuno telah terdapat konsep tentang keagamaan, yang walaupun orang Batak Toba kuno sendiri belum menyadarinya sebagai manifestasi keagamaan.

Masyarakat Batak Toba kuno telah berhasil mengembangkan suatu bentuk keagamaan primitif dengan menampilkan tokoh keallahan, diantaranya *Mulajadi Nabolon* sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, *Debata Natolu* yang terdiri dari

Bataraguru, Soripada, dan Mangalabulan, dan terakhir adalah *Debata Asiasi* sebagai lambang kesatuan serta totalitas.

Zat kehidupan

Selanjutnya masyarakat Batak Toba kuno percaya, disamping para *Debata* masih ada kekuatan lain yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Malah baik buruknya hidup manusia tergantung pada respon yang diberikan pada kekuatan dan tenaga ini. Mereka itulah yang disebut dengan *tondi* dan *begu*.

Tondi (roh, nyawa) berada dalam tubuh manusia dan merupakan satu kesatuan. Manusia menjadi makhluk yang hidup karena memiliki *tondi*. *Tondi* memiliki zat kehidupan yang berlangsung selama-lamanya dan tidak dapat dirusak oleh apapun. Orang Batak Toba kuno mengenal dua jenis *tondi*, yaitu: *tondi* yang terdapat dalam tubuh manusia dan berhubungan dengannya pada masa kehidupan manusia saja. Kedua, *tondi* yang merupakan bayangan yang melanjutkan aktivitas manusia. Artinya, manusia secara biologis mungkin telah mati, tapi aktivitasnya masih dilanjutkan oleh *tondi*-nya.

Kehadiran *tondi* dalam tubuh manusia merupakan faktor penentu bagi kesehatan manusia. Timbulnya sesuatu penyakit, kegelisahan, atau kemalangan diyakini sebagai akibat dari lemahnya *tondi*, atau kepergian *tondi* dari tubuh manusia. Bila kepergian *tondi* berlangsung lama dan tidak datang lagi ke dalam tubuh dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian bagi manusia. Konon ada empat penyebab *tondi* meninggalkan tubuh manusia yaitu saat tidur, terkejut, mimpi dan kematian (R. Pasaribu, 1988:130-131).

Rasa takut

Apabila orang meninggal dunia, maka *tondi* berubah menjadi *begu* (Ph.L.Tobing, 1956:101). Jadi roh-roh yang menjadi *begu* inilah yang menimbulkan rasa takut bagi manusia yang masih hidup. Adanya rasa takut menjadi faktor utama aktivitas orang Batak Toba kuno

untuk mengkultuskannya. Ini pula menjadi dasar ritus (kebaktian), yaitu upaya menghormati dan memuja *begu* sesuai keyakinannya (R.Pasaribu, 1988:125).

Pada umumnya *begu* dibagi dua golongan, yaitu (1) *begu* dari orang yang sudah meninggal, dan (2) *begu* lain yang berkeliaran di alam semesta yang secara umum dalam bahasa sehari-hari biasa disebut hantu (Parkin, 1978:148). Menurut sifatnya ada *begu* yang jahat dan *begu* yang baik (Marbun-Harahap, 1987:30). Sebenarnya orang Batak Toba kuno tidak menyebut *begu* kepada arwah orang yang dihormatinya. Arwah orang yang dicintai dan dihormati biasa disebut dengan *sumangot* (roh yang dipuja) dan *sombaon* (roh yang disembah).

Sehubungan dengan itulah ada ritus pemujaan nenek moyang berupa penggalian tulang belulang dari kuburan sementara (*mangongkal holi*) dan pemakaman kembali yang dilakukan bagi leluhur yang dianggap memiliki pengaruh istimewa. Melalui penghormatan, misalnya, dalam upacara adat diharap, bahwa roh nenek moyang akan diangkat menjadi *sumangot*. Bila dilakukan penghormatan lebih besar lagi bagi *sumangot* dan keturunannya menjadi kelompok besar, maka *sumangot* menjadi *sombaon*. *Sombaon* dipandang sebagai roh yang berkuasa dan harus dihormati, malah dipercaya dekat dengan para *Debata* yang menguasai kehidupan manusia.

Ada bermacam ragam sebutan untuk arwah orang mati yang dinamai *begu*, antara lain adalah *begu laos* bagi arwah orang yang semasa hidupnya merupakan pengemis, *begu gunung* untuk arwah orang yang sewaktu hidup bekerja sebagai pandai besi, konon arwahnya ditempatkan oleh *Mulajadi Nabolon* di puncak gunung. *Begu jau* adalah arwah orang yang tidak dikenal, *begu nurnur* bagi arwah orang yang mati tapi tempatnya belum sempat diukur sewaktu dimakamkan, *begu siharhar* untuk orang yang mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Sementara *begu antuk* (roh pemukul) dan *begu ganjang* adalah sebutan bagi *begu* yang dapat memukul orang dengan tiba-tiba hingga menemui

ajalnya. Kedua jenis *begu* ini dianggap banyak menyebarkan penyakit menular seperti kolera, sampar dan sebagainya.

Demikian ulasan singkat mengenai paham orang Batak Toba kuno tentang *begu* dalam koteks ‘pneumatologi’ Batak Toba tradisional. Sehubungan dengan *begu ganjang* yang diyakini sebagai personifikasi bagi segala jenis roh-roh yang mampu membuat orang meninggal secara mendadak, segera muncul pertanyaan berikut: Adakah gejala dan isu *begu ganjang* yang sempat hangat di Sumatera Utara sebetulnya hanya merupakan gejala menularnya berbagai jenis penyakit membahayakan yang tentu saja dapat merenggut nyawa manusia dalam waktu singkat? Kalau memang itu, cara mengatasinya adalah menggalakkan pengobatan secara medis, *bukan* dengan menuduh dan membinasakan orang yang diduga memiliki dan memelihara *begu ganjang*.

Pendampingan pastoral?

Oleh karena itu, dalam menghadapi masyarakat atau umat yang menyebarkan isu *begu ganjang* sebetulnya dibutuhkan pendekatan pastoral yang bijaksana.

Terlepas dari persoalan apakah memang *begu ganjang* ada atau tidak, menarik untuk mengamati mengapa masyarakat menghembuskan isu *begu ganjang* tersebut. Berbagai faktor, misalnya, kecemburuan sosial, persoalan ekonomi, dan persaingan politis bisa mendasari orang memunculkan isu *begu ganjang*. Kegersangan dan kehampaan iman kristiani serta kebuntuan dalam menghadapi segala jenis persoalan kehidupan sehari-hari juga dapat merangsang orang untuk cepat melemparkan tanggungjawab dan kesalahan kepada pihak lain. Dengan meminjam terminologi *begu ganjang* orang merasa lebih gampang menghakimi pihak lawan atau orang lain yang tidak disenangi sebagai pihak yang bersalah, sumber permasalahan, dan penderitaan, maka harus segera dibinasakan.

Berhadapan dengan gejala ini beberapa kebijakan pastoral yang barangkali bisa dilakukan adalah: *Pertama*, memberikan

penjelasan yang benar secara antropologis, historis dan sosiologis kepada jemaat seputar *begu ganjang*, sehingga orang mengerti latar belakang kemunculan kata *begu ganjang* pada masyarakat. *Kedua*, menggalakkan diskusi dan seminar secara teratur mengenai isu yang hangat di masyarakat, sehingga umat merasa terlibat dan turut memikirkan pemecahan atas persoalan yang muncul di antara mereka. *Ketiga*, mengadakan pendekatan dan pendampingan pastoral kepada kedua belah pihak baik korban atau pihak yang dituduh memelihara *begu ganjang*, maupun kelompok masyarakat yang sudah dan/atau potensial bertindak anarkhis.

7.

SPE SALVI DAN KITA

Spe salvi facti sumus (dalam pengharapan kita diselamatkan) adalah kata-kata awal ensiklik terbaru Paus Benediktus XVI, *Spe Salvi*, yang mengutip surat Paulus kepada umat di Roma 8, 24. Ensiklik kedua yang dipublikasikan pada pesta Santo Andreas, 30 November 2007 lalu ini, muncul hampir dua tahun setelah ensiklik pertama *Deus Caritas est* (Allah adalah cinta) yang menekankan cinta Allah atas dunia ini. Di antara kedua ensiklik ini, 2006, terbit buku *Yesus dari Nasaret* yang berisi permenungan pribadi iman Bapa Paus mengenai Yesus Kristus.

Bukanlah kebetulan bahwa kedua ensiklik dan buku *Yesus dari Nasaret* berkaitan satu sama lain. Baik ensiklik pertama maupun yang kedua membahas keutamaan injili: iman, pengharapan dan kasih yang berakar dari ajaran Yesus Kristus sendiri. Dalam *Deus Caritas est* diungkapkan bahwa kelepasan sejati tidak ditawarkan oleh perbaikan struktur dalam masyarakat, tapi oleh cinta kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Lalu dalam *Spe Salvi* Paus mengajak orang Kristen (dan umat manusia pada umumnya) untuk melihat pengharapan sebagai wujud iman. Dan iman yang menumbuhkan harapan itu bisa membawa perubahan sosial kemasyarakatan (bdk. nr. 5-6).

Yang menarik dari ensiklik terbaru ini ialah pemaparan kritis dan mendalam mengenai harapan yang diulas secara reflektif dan meditatif tanpa mengurangi kompetensi ilmiahnya. Ensiklik yang terdiri dari 50 artikel dan memiliki 40 catatan kaki ini sungguh berkiblat pada tinjauan biblis dan ajaran gereja, juga sarat dengan refleksi filosofis yang mengutip antara lain pemikiran Kant, Bacon, Adorno, serta sastrawan Dostojewski dan Jean Giono. Dipaparkan pula hasil

diagnosa mutakhir mengenai masyarakat melalui refleksi teologis serta kesaksian para tokoh sejarah masa lampau dan kini. Jadi, secara sederhana ensiklik akhirnya disuguhkan dalam dua bagian besar, yaitu: penjelasan alkitabiah dan gerejani (nr. 2-31) dan latihan rohani dalam membina hidup berpengharapan (nr. 32-49).

Lebih menyejukkan lagi ialah dalam kaitan dengan hubungan ekumenis. Publikasi pada pesta St. Andreas yang merupakan hari raya besar bagi gereja Ortodoks Timur memiliki makna simbolis yang positif dalam rangka membangun gerakan ekumene. Malah, Ketua Asosiasi Gereja Lutheran Jerman, Pendeta Friedrich Weber misalnya, melihat ensiklik terbaru ini bukan seperti dekrit, melainkan sebagai undangan untuk membicarakan dan merenungkan bersama makna iman, harapan dan kasih.

Lalu bagaimana harus menyikapi ensiklik ini dalam konteks kita? Dengan kata lain, apakah relevansi ensiklik ini bagi umat katolik dan warga Indonesia pada umumnya? Ensiklik yang menandakan kembali arti pengharapan amat penting direnungkan disaat warga negeri ini sedang menghadapi berbagai macam krisis di dalam hidupnya. Mulai dari krisis ekonomi yang masih juga belum menunjukkan titik terang perbaikan hidup orang miskin. Bangsa kita juga mengalami krisis wibawa kepemimpinan yang sejak era reformasi masih belum juga sanggup membawa negeri ini ke suasana yang lebih baik. Yang lebih urgen lagi adalah krisis ekologis khususnya pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia di bumi ini. Di tanah air kita, pembabatan hutan masih terus merajalela yang membawa akibat pengrusakan alam cukup parah. Hidup sebagian masyarakat di negara kita makin hari terasa makin sulit baik karena ketidakpastian sumber penghasilan maupun ketidakpastian hukum, dimana keadilan hanya berpihak kepada orang kuat dan berkuasa. Keanekaragaman suku dan agama, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah juga amat rentan dengan konflik horizontal dan vertikal.

Keadaan ini semua tentu membuat kita takut dan kadang bisa mengalami putus asa. Niat baik segelintir orang yang berhati tulus

ingin membangun negeri ini lepas dari keterpurukannya seakan tidak berdaya dan hanyut oleh arus massa dengan prinsip *mumpungisme*, menikmati kekuasaan untuk memperkaya diri, *mumpung* ada kesempatan setiap orang mencari keuntungan pribadi, sehingga orang kecil dan tak berdaya makin tersapu oleh gerakan massal yang mengutamakan ketamakan.

Masih adakah setetes harapan untuk kita? Masih adakah jejak-jejak keselamatan membekas dalam gurun ketidakpastian di negeri kita? Bapa Paus dalam *Spe Salvi* mengatakan iman mendorong kita untuk maju dan membangun negeri ini (bdk. nr. 16-23), dan justeru disitulah wujud konkrit dari pengharapan kristiani dengan turut serta memikirkan kemajuan bangsa kita (bdk. nr. 34-31). Kalau demikian, di tengah kemelut dan multi krisis bangsa ini, air pengharapan masih tetap menetes, karena memang dalam pengharapan itulah kita diselamatkan.

8.

ANALISIS KURIKULUM PROGRAM STUDI (PRODI) S1 MISIOLOGI

Pendahuluan

Dalam pertemuan Konsultasi Penyusunan Silabus Kurikulum Misiologi yang berlangsung pada 16-19 Juli 2010 ini saya diminta oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI untuk menjadi nara sumber berkaitan dengan materi: (1) Analisis Kurikulum Program Studi (Prodi) S1 Misiologi, dan (2) Kurikulum Prodi S1 Misiologi untuk Pendidikan Tinggi Teologi (PTT)/Agama Kristen (AK) di Indonesia. Dengan materi ini diharapkan para peserta dapat tertolong dalam merevisi kurikulum S1 Misiologi yang selama ini digunakan atau yang sedang dirancang. Selain itu, peserta pertemuan ini pada akhirnya dapat juga menyusun dan menyempurnakan silabus semua mata kuliah yang ada dalam kurikulum S1 Misiologi.

Pada kesempatan ini saya pertama-tama membahas mengenai analisis kurikulum Prodi S1 Misiologi. Kegiatan untuk menyusun kurikulum program studi S1 Misiologi dalam rangka pendidikan tinggi teologi di Indonesia tidak lepas dari kepedulian pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI untuk membangun pendidikan teologi di Indonesia yang kontekstual dalam arti bahwa pengembangan pemikiran teologi perlu diarahkan agar memberi sumbangan dalam rangka menjawab persoalan konkrit masyarakat dan bangsa Indonesia.

Karena kita akan sering berbicara mengenai kurikulum, perlu dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. *Kurikulum perguruan tinggi* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.¹¹

Dasar hukum penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi

Agar bisa menganalisis kurikulum prodi S1 Misiologi, maka kita perlu mengacu pada peraturan formal pemerintah mengenai perguruan tinggi, karena secara resmi program studi teologi telah diakui eksistensinya. Oleh sebab itu pemerintah sendiri melalui beberapa keputusan Mendiknas antara lain Kepmendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan no. 45/U/2002 mengenai Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (mengenai kurikulum diatur dalam pasal 36, 37, 38), dan PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (kerangka dasar dan struktur kurikulum diatur dalam pasal 9 ay.3, pasal 17 ay. 4) memberikan rambu-rambu, pedoman dan cara menyusun kurikulum pendidikan tinggi, dan dengan itu juga sekaligus menuntut peninjauan ulang kurikulum pendidikan teologi sebagai bagian dari pendidikan tinggi di Indonesia.

Perlunya merevisi kurikulum pendidikan dipengaruhi oleh laporan komisi internasional tentang pendidikan untuk abad 21 dari UNESCO yang mengidentifikasikan *empat pilar pendidikan*, yaitu: (1) *learning to know*, artinya bukan terutama tahu banyak materi mata pelajaran, tapi penguasaan instrumen pengetahuan atau bagaimana tiba pada pengetahuan itu. Dalam konteks pendidikan teologi, mampu menguasai ajaran imannya dengan menginterpretasikan, menganalisa dan membuat sintesa dari padanya secara bertanggung jawab. (2) *learning to do*, artinya mampu bertindak sesuai dengan ajaran imannya. (3) *learning to be*, artinya pendidikan memainkan peranan dalam perkembangan menyeluruh dari setiap individu. Dalam konteks pendidikan teologi,

11 Pasal 1 ayat 6 Kepmendiknas no 232/U/2000.

mampu berperilaku dan berkembang dalam berkepribadian sesuai ajaran imannya. (4) *learning to live together*, artinya dapat hidup mengummat dan memasyarakat sesuai dengan ajaran imannya.

Inilah sebabnya struktur kurikulum pada perguruan tinggi di Indonesia, dalam hal ini termasuk pendidikan tinggi teologi, khususnya kurikulum program studi S1 misiologi, dikelompokkan ke dalam *lima kategori*, sebagaimana diatur dalam pasal 8, ayat 1 Kepmendiknas no 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yaitu:

- (1) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa pada Tuhan, berbudi luhur dan berkepribadian mantap dan mandiri serta punya rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan bangsa;
- (2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) yang bertujuan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu,
- (3) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai,
- (4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) yang diperlukan seseorang untuk memahami kaidah, hidup bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kurikulum di perguruan tinggi itu dibagi atas dua, yakni *kurikulum inti* dan *kurikulum institusional*. Jadi baik mata kuliah kurikulum inti dan kurikulum institusional dimasukkan dalam kelima kelompok kategori di atas. Adapun yang dimaksud dengan *kurikulum inti* adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam Kurikulum yang berlaku secara

nasional¹², sedangkan *kurikulum institusional* adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari Kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.¹³

Jadi, setiap kurikulum suatu program studi (prodi) selalu memiliki kurikulum inti dan kurikulum institusional. Demikian juga, misalnya kurikulum prodi S1 Misiologi dalam suatu institusi perguruan tinggi, akan memiliki kurikulum inti dan kurikulum institusional dari perguruan tinggi bersangkutan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi

Adapun prinsip pengembangan kurikulum pendidikan tinggi kita di Indonesia adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum.

Apakah itu kompetensi? *Kompetensi* adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.¹⁴ Dalam konteks guru dan dosen *kompetensi* adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Pasal 1 ayat 10 UU no 14/2005 tentang Guru dan Dosen).

Pendidikan berbasis kompetensi memberikan tekanan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi yang kerap dinamakan dengan standar kompetensi adalah kemampuan

12 Pasal 7 ayat 2 Kepmendiknas no 232/U/2000.

13 Pasal 7 ayat 4 Kepmendiknas no 232/U/2000.

14 Pasal 1 Kepmendiknas no 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.

yang secara umum harus dikuasai lulusan. Kompetensi merupakan ‘pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur’ (Hall/Jones, 1976: 29). Kompetensi atau kemampuan lulusan menjadi modal penting untuk bisa bersaing di kancah global, sebab persaingan yang lebih ketat ada pada sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu lulusan pendidikan tinggi teologi jurusan misiologi yang berbasis kompetensi diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang bisa berkompetensi di tingkat global. Implikasi pendidikan berbasis kompetensi ialah *pengembangan silabus dan sistem penilaian berbasis kompetensi*.

Paradigma pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi mencakup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian yang menekankan pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar kompetensi. Kurikulum berisi bahan ajar yang diberikan kepada para mahasiswa lewat proses pembelajaran. Dan, proses pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran yang mencakup pemilihan materi, strategi, media, penilaian, serta sumber atau bahan pembelajaran. Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa bisa diamati dari kemampuan mereka menyelesaikan tugas-tugas yang mesti dikuasai sesuai dengan standar prosedur yang ditentukan.

Seorang lulusan perguruan tinggi yang kompeten harus dapat memenuhi persyaratan sejalan dengan lima kategori kurikulum, yakni: 1) memiliki landasan kemampuan pengembangan kepribadian, 2) kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan, 3) kemampuan berkarya, 4) mampu berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, 5) dapat hidup bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati, menghargai nilai-nilai pluralisme dan kedamaian.

Secara rasional pengembangan KBK adalah 1) meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan secara bersamaan dengan peningkatan mutu pendidikan. Maka, pendidikan harus relevan, bermutu, adil dan manusiawi menjangkau masyarakat, 2)

pengembangan wawasan persaingan keunggulan bangsa Indonesia menuju pendidikan yang bermutu, 3) kaitan pendidikan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, 4) mendorong terciptanya masyarakat belajar yakni individu yang berkemauan, 5) menyiapkan generasi masa kini dan masa depan lewat proses belajar sesuai dengan tugas nyata.¹⁵

Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang khusus dan sesuai dengan kompetensi utama. Sementara elemen-elemen penting kompetensi itu adalah (1) landasan kepribadian, (2) penguasaan ilmu dan kepribadian, (3) kemampuan berkarya, (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan, dan (5) pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Merancang Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi

Bagaimanakah cara kita untuk merancang Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi? Mekanismenya tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Berikut ini dicoba dirangkumkan ketentuan umum berkaitan dengan rancangan kurikulum inti Prodi S1 Misiologi.

- a. *Beban studi*: Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Kepmendiknas no 232/U/2000 beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah. Sementara dalam pasal 8 ayat 2 Kepmendiknas yang sama ditetapkan bahwa kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40-80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana. Hal yang sama diatur dalam pasal 5 Kepmendiknas

15 Sri Jutmini et.al.: *Panduan Pengembangan Kurikulum*, Surakarta: Pusat Pengembangan sistem Pembelajaran Lembaga Pengembangan Pendidikan, Universitas Sebelas, 2007, hal. 5.

16 Pasal 1 dan 2 Kepmendiknas no 45/U/2002.

no 45/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi, yang mengatakan, “Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%: 20-40%: 0-30%.

- b. *Penetapan kurikulum*: Kurikulum inti untuk setiap program studi seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 Kepmendiknas no 232/U/2000 TIDAK ditetapkan oleh Mendiknas, tetapi oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna (Kepmendiknas no 45/U/2002 pasal 6 ayat 2). Malahan dalam *pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) no. 19 tahun 2005* tentang Standar Nasional Pendidikan menandakan, bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh *perguruan tinggi bersangkutan* untuk setiap program studi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (ayat 1). KTSP dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing (ayat 3). KTSP untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing PT dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (*pasal 17 ayat 4 PP no 19/2005*).
- c. *Sifat kurikulum inti*: kurikulum inti yang merupakan pemberi ciri pada kompetensi utama, memiliki sifat sebagai berikut: (1) dasar dalam mencapai kompetensi lulusan, (2) menjadi acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, (3) berlaku secara nasional, (4) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang cepat di masa mendatang, (5) memuat kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan (Pasal 3 ayat 2 Kepmendiknas no 45/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi. Menjadi tantangan bagi kita, apakah kelima aspek ini sudah dimiliki oleh (draft) kurikulum inti prodi misiologi saat ini?

- d. *Pengembangan kurikulum*: Menurut UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 3, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Lalu ayat 4 menambahkan, “Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.”
- e. *Tahap-Tahap Penyusunan Kurikulum*:¹⁷ (1) Identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap lulusan: Tujuannya adalah agar lulusan yang dihasilkan dapat diterima di masyarakat, karena kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan. Sumber informasi yang dapat digunakan adalah lembaga pemerintah/swasta, perkumpulan profesi, alumni yang sudah bekerja. (2) Mendiskripsikan kompetensi lulusan: Rumusan ini menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan suatu program studi. Kemampuan ini disebut dengan kompetensi lulusan program studi. Kompetensi ini boleh jadi terdefinisikan dalam jumlah yang banyak dan bukan merupakan kompetensi tunggal. (3) Mendiskripsikan pengalaman belajar: pengalaman belajar adalah serangkaian kegiatan yang harus dijalani peserta didik agar mencapai kemampuan yang sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Pengalaman belajar tidak disusun atas dasar penting tidaknya materi belajar, tapi berdasar pada kaitannya dengan kompetensi yang dirumuskan program studi. Keluasan dan kedalaman pengalaman belajar yang disajikan tergantung pada bentuk kompetensi yang diinginkan. (4) Menyusun bidang kajian: Bidang kajian inilah yang digunakan dalam memberikan pengalaman belajar. Suatu bidang kajian kemungkinan hanya akan memberikan sebagian dari kompetensi lulusan. Karena itu,

17 Sri Jutmini et.al.: *Panduan Pengembangan Kurikulum*, Surakarta: Pusat Pengembangan sistem Pembelajaran Lembaga Pengembangan Pendidikan, Universitas Sebelas, 2007, hal. 8-10.

bidang kajian yang disajikan harus mencukupi dan mendukung terbentuknya kompetensi lulusan sebuah program studi. Bidang-bidang kajian yang telah teridentifikasi sesuai dengan kebutuhan kompetensi masih terpisah-pisah dan berdiri sendiri. (5) Penamaan bidang kajian: Bidang kajian yang masih terpisah lalu dikelompokkan. Dasar pengelompokan adalah menurut kedekatan keilmuan. Urutan penyusunan bahasan dalam bidang kajian dapat menggunakan teknik hirarkis, sejajar, maupun kombinasi keduanya. Satu bidang kajian yang dalam dan luas dapat dipecah menjadi sub bidang kajian, bila diperlukan. Bidang kajian dan sub bidang kajian inilah yang diberikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran dalam bentuk mata kuliah. Pemberian bobot kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kedalaman, keluasan dan waktu yang tersedia dalam satu semester. Selain itu harus juga ada standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikatornya.

- f. *Struktur Kurikulum*.¹⁸ (1) Identitas lembaga: yang memuat nama fakultas/sekolah tinggi, program studi, bagian atau jenisnya sebagai penyelenggara pendidikan. (2) Gelar lulusan: menyesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku. (3) Tujuan pendidikan: merupakan cerminan visi, harapan tentang citra lulusan dari lembaga penyelenggara pendidikan, termasuk citra kompetensi (sebagai ciri pembeda antara fakultas, jurusan, program studi, bagian seperti pengetahuan dan pemahaman, keterampilan intelektual, keterampilan praktis, dan keterampilan managerial serta sikap). (4) Fasilitas utama penyelenggaraan jurusan/program studi: Sarana dan prasarana pembelajaran pendukung seperti media pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, jaringan informasi dengan lembaga internal dan eksternal, serta tenaga non edukatif yang telah terlatih guna membantu penyelenggaraan pembelajaran. (5) Persyaratan akademik dosen: pendidikan tenaga akademis harus dimiliki sebagai penyangga

18 *Ibid.*, hal. 10-12.

penyelenggaraan pembelajaran. (6) Penentuan substansi kajian kompetensi: sehingga dapat membedakan kompetensi utama/ inti dan kompetensi penunjang. (7) Proses belajar mengajar dan bahan kajian: strategi pembelajaran akan dipilih sesuai dengan bahan kajian. (8) Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi: dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) seharusnya menggunakan sistem evaluasi berbasis kelas, dengan harapan agar semua kegiatan peserta didik dihargai secara objektif. (9) Pelibatan kelompok calon pengguna (*stakeholder*): institusi penyedia lulusan harus disesuaikan dengan calon pengguna/ permintaan *stakeholder* agar ada keseimbangan. (10) Struktur kurikulum: uraian tentang ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara jurusan/program studi yang dilihat dari gatra: (a) nilai pembentuk kehidupan yang berkebudayaan, (b) keterkaitan komplementer-sinergis di antara kompetensi utama. (11) kurikulum inti: sifatnya nasional, ditentukan secara nasional dari Departemen Pendidikan Nasional, tidak sampai pada bentuk mata kuliah, dan hanya berbentuk kompetensi dan substansi kajian. (12) Kurikulum institusional: sifatnya lokal, merupakan kekhususan program studi, dikembangkan oleh jurusan, program studi sampai pada penentuan mata kuliah, pelibatan *stakeholder*, *expert* atau *trans-expert*. (13) Format kurikulum: meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator. (14) Format silabus: memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, pengalaman belajar, hasil belajar, indikator pencapaian, langkah pembelajaran yang memuat kegiatan peserta didik dan materi, alokasi waktu, sistem evaluasi yang digunakan, serta sarana dan sumber belajar yang digunakan.

Dengan memperhatikan ketentuan umum yang diuraikan di atas, kita sudah bisa mencoba menganalisa kurikulum inti prodi S1 Misiologi yang sudah ada.

Beberapa waktu yang lalu diadakan pertemuan para dosen

misiologi di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut disusun suatu draf kurikulum inti Prodi S1 misiologi, yang bentuknya adalah sebagai berikut:

Kurikulum Inti Program Studi Strata Satu (S1) Misiologi (Draf versi Yogyakarta)

Profil Lulusan Prodi S1 Misiologi: *Manusia cerdas yang memiliki spiritualitas dan profesionalitas yang kompeten di bidangnya, serta mampu mengembangkan diri, sehingga sanggup melaksanakan tugas misi dalam masyarakat majemuk.*

I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): 18 SKS

Tujuan: (1) mengembangkan wawasan keagamaan yang terbuka dan toleran, dan (2) membentuk kepribadian yang utuh dalam rangka berbangsa dan bernegara.

1. Bahasa Indonesia	2 sks
2. Bahasa Inggris	4 sks
3. Spiritual formation	2 sks
4. Psikologi	2 sks
5. Sosiologi	2 sks
6. Komunikasi	2 sks
7. Pendidikan Pancasila/PPKN	2 sks
8. Manajemen misi	2 sks

II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK): 32 SKS

Tujuan: (1) memberikan landasan penguasaan ilmu teologi, dan (2) memberikan keterampilan berteologi dalam konteks masyarakat Indonesia.

1. Pengantar misi	2 sks
2. Pemb. Perjanjian Baru	4 sks
3. Pemb. Perjanjian Lama	4 sks
4. Misi dalam PB	2 sks
5. Bahasa Yunani	4 sks
6. Hermeneutika	2 sks
7. Pengantar filsafat	2 sks

8. Pemb. Teologi Sistematis	2 sks
9. Bahasa Ibrani	4 sks
10. Misi dalam PL	2 sks
11. Dasar-dasar misi	2 sks
12. Metoda penelitian	2 sks

III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB): 44 SKS

Tujuan: (1) mengembangkan penguasaan disiplin ilmu teologi, dan (2) mengembangkan kemampuan refleksi teologi dalam konteks masyarakat Indonesia.

1. Musik Gerejawi	2 sks
2. Misi Pertumbuhan Gereja	2 sks
3. Strategi Misi	2 sks
4. Teologi Agama-agama	2 sks
5. Misi di Pedesaan	3 sks
6. Misi di Perkotaan	3 sks
7. Sejarah Gereja Umum	2 sks
8. Sejarah Gereja Indonesia	2 sks
9. Sejarah Gereja Asia	2 sks
10. Sejarah Perkembangan Misi	2 sks
11. Misi Kontemporer	2 sks
12. Dogmatika	4 sks
13. Etika Misionaris	2 sks
14. Tafsir PL	4 sks
15. Tafsir PB	4 sks
16. Agama Suku	2 sks
17. Etika Kristen	2 sks
18. Konseling Pastoral	2 sks

IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB): 14 SKS

Tujuan: (1) membangun sikap dan perilaku dalam berteologi, dan (2) membangun sikap pengembangan ilmu teologi dalam interaksi dengan bidang-bidang ilmu lainnya.

BERPIJAK PADA REALITAS
tantangan pastoral, misiologi dan
pendidikan agama kristen

1. Antropologi	2 sks
2. Pembinaan Warga Gereja	2 sks
3. Statistika	2 sks
4. Multimedia	2 sks
5. Misi Kontekstual	2 sks
6. Oikumene	2 sks
7. Pemuridan	2 sks

IV. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB): 12 SKS

Tujuan: membangun wawasan kehidupan bermasyarakat yang pluralistik religius.

1. Praktek Misi	6 sks
2. Skripsi	6 sks

Jadi kalau direkapitulasi secara keseluruhan:

MPK	18 sks
MKK	32 sks
MKB	44 sks
MPB	14 sks
MBB	12 sks

Total	120 sks

Setelah mengamati draf Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi ini, saya memberikan beberapa catatan yang barangkali bisa dipertimbangkan sebagai bahan revisi bagi Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi yang baru.

1. *Beban studi:* Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Kepmendiknas no 232/U/2000 beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah. Perguruan Tinggi Teologi di lingkungan

Bimas Kristen Kementerian Agama RI menetapkan bahwa beban studi seluruh program sarjana misiologi adalah 148 sks. Sementara dalam pasal 8 ayat 2 Kepmendiknas yang sama ditetapkan bahwa kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40-80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana. Lalu Bimas Kristen Kemenag RI menetapkan bahwa kurikulum inti prodi S1 misiologi adalah 50% dari 148 sks, maka jumlah total kurikulum inti prodi S1 misiologi adalah 74 sks, jadi bukan 120 sks seperti dalam draf. Jadi dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pemilihan 50% dari range 40-80% dimaksudkan untuk memberi peluang bagi setiap sekolah tinggi untuk mengembangkan dan memperbanyak muatan lokal dalam kurikulum institusionalnya. Selain itu dimaksudkan bahwa seharusnya pendidikan misiologi di Indonesia bersifat kontekstual.

2. Kompetensi lulusan prodi S1 Misiologi: *lulusan yang dengan kedewasaan spiritual mampu mengembangkan misi kontekstual, dan memiliki kompetensi untuk melayani dalam gereja dan masyarakat.*
3. Tujuan kelompok mata kuliah dan persebarannya: Pada prinsipnya tujuan masing-masing kelompok mata kuliah dalam draf sungguh bagus, karena diadopsi dari rumusan yang ada dalam Kurikulum Inti Persetia edisi tahun 2003 yang lalu (bdk Kurikulum Inti Persetia, 2003: 4-5). Namun saya mau merevisi rumusan yang lebih relevan dengan misiologi. Berikut ini saya tampilkan draf usulan saya mengenai Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi.

KURIKULUM INTI PRODI S1 MISIOLOGI

(Gelar lulusan: Sarjana Misiologi – S.Mis.)

Profil Lulusan Prodi S1 Misiologi adalah manusia yang dengan kedewasaan spiritual mampu mengembangkan misi kontekstual, dan memiliki kompetensi untuk melayani dalam gereja dan masyarakat.

- I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): 8 SKS
Tujuan: (1) Mengembangkan wawasan keagamaan yang terbuka dan toleran, dan (2) membantuk kepribadian yang utuh dalam rangka berbangsa dan bernegara.

Kelompok ini terdiri atas:

1. Pendidikan Pancasila	2 sks
2. Kewarganegaraan	2 sks
3. Spiritualitas Kristiani	2 sks
4. Pendidikan Agama Kristiani	2 sks

- II. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK): 18 SKS
Tujuan: (1) memberikan landasan penguasaan ilmu misiologi dan (2) memberikan keterampilan bermisi dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kelompok ini terdiri atas:

1. Pengantar Misiologi	2 sks
2. Pembimbing Perjanjian Baru	2 sks
3. Pembimbing Perjanjian Lama	2 sks
4. Bahasa Yunani	2 sks
5. Bahasa Ibrani	2 sks
6. Pengantar Filsafat	2 sks

7. Metode Penelitian Teologi	2 sks
8. Misi dalam PL	2 sks
9. Misi dalam PB	2 sks

III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB): 32 SKS

Tujuan: (1) mengembangkan penguasaan disiplin ilmu misiologi, dan (2) mengembangkan kemampuan refleksi misiologis dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kelompok ini terdiri atas:

1. Hermeneutika PL	2 sks
2. Hermeneutika PB	2 sks
3. Misi Pertumbuhan Gereja	2 sks
4. Strategi dan Metode Misi	2 sks
5. Misi di Pedesaan	3 sks
6. Misi di Perkotaan	3 sks
7. Misi Kontemporer	2 sks
8. Sejarah Gereja Umum	2 sks
9. Sejarah Gereja Asia	2 sks
10. Sejarah Gereja Indonesia	2 sks
11. Sejarah Perkembangan Misi	2 sks
12. Teologi Kontekstual	2 sks
13. Misi dan Komunikasi	2 sks
14. Kristologi	2 sks
15. Ekklesiologi	2 sks

IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB): 10 SKS

Tujuan: (1) membangun sikap dan perilaku bermisi, dan (2) membangun sikap pengembangan misiologi dalam interaksi dengan bidang ilmu lainnya.

Kelompok ini terdiri atas:

BERPIJAK PADA REALITAS
tantangan pastoral, misiologi dan
pendidikan agama kristen

1. Misi Kontekstual	2 sks
2. Etika Kristen	2 sks
3. Teologi Agama-Agama	2 sks
4. Homiletika	2 sks
5. Ekumenika	2 sks

V. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB): 6 SKS

Tujuan: membangun wawasan kehidupan bermasyarakat yang pluralistik-religius.

Kelompok ini terdiri atas:

1. Misi dalam Masyarakat Majemuk	2 sks
2. Agama Islam	2 sks
3. Teologi Sosial	2 sks

Deskripsi dan Kompetensi Mata Kuliah

Masing-masing mata kuliah yang ada dalam Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi diatas memiliki deskripsi dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa. Rumusan deskripsi dan kompetensi ini masih terbuka untuk diperbaiki oleh para dosen dan pakar di bidangnya di hari mendatang. Berikut ini beberapa contoh deskripsi dan kompetensi:

1. Pengantar Misiologi (2 sks)

Deskripsi: Mempelajari latar belakang sejarah dan arti terminologi misi dan misiologi dalam rangka memperoleh pengetahuan dasar mengenai tujuan studi misiologi guna membangun pemahaman bersama dalam masyarakat pluralis.

Kompetensi: Supaya mahasiswa dapat mengaktualisasikan diri dalam memahami misiologi itu sebagai suatu karya hidup berperilaku di tengah masyarakat.

Substansi: (1) mempelajari berbagai fenomena baik teoretis maupun praktis dan konteks sosial kultural agama dan gereja, (2) memahami pergeseran paradigma misiologi dan perubahan-perubahannya di tengah masyarakat.

2. Teologi Kontekstual (2sks)

Deskripsi: Mempelajari secara kontekstual dengan sikap apresiatif dan kritis dasar-dasar, metodologi dan konsep-konsep teologi dalam konteks yang berkembang terus menerus.

Kompetensi: Mahasiswa trampil menguraikan secara kontekstual dengan sikap apresiatif dan kritis dasar-dasar, metodologi dan konsep-konsep serta mampu berteologi dalam konteks yang berkembang.

Substansi: (1) Prinsip-prinsip dasar metodologi kontekstual dalam ilmu teologi, (2) Keanekaragaman jenis dan bentuk teologi di beberapa konteks belahan dunia, (3) Keanekaragaman usaha berteologi di Asia dan Indonesia, (4) Arah pengembangan teologi dalam konteks Indonesia.

(Peserta dapat diajak bekerja dalam kelompok untuk menyusun deskripsi, kompetensi, dan substansi mata kuliah yang lain dalam Kurikulum Inti Prodi SI Misiologi ini)

Bertolak dari deskripsi, kompetensi dan substansi yang diuraikan tadi kita dapat mengembangkannya dalam silabus. Dalam Pasal 20 PP no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan, bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat: tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Silabus pada hakikatnya adalah susunan teratur yang didata secara logis dan sistematis tentang komponen-komponen suatu sistem pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang dikembangkan pada setiap semester sesuai karakteristik mata kuliah, yang dijadikan rujukan dan pemandu pelaksanaan proses pembelajaran untuk kebutuhan menyusun satuan acara perkuliahan (SAP)/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada kelas tertentu.

Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang didalamnya berisikan komponen-komponen identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), Materi pokok/Pembelajaran/Rincian Materi, Indikator hasil belajar, Kegiatan Pembelajaran (pengalaman belajar, metode, tugas), Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar. (Uraian lebih lengkap dan mendalam bagaimana cara menyusun dan mengembangkan silabus akan dibahas oleh nara sumber berikutnya).

Berikut ini saya mau tunjukkan satu contoh pengembangan silabus.

Nama Mata Kuliah :PENGANTAR MISIOLOGI	
KODE :	
SKS : 2	
SEMESTER : I	
PRASYARAT : TIDAK ADA	
BANYAKNYA PERTEMUAN /WAKTU TIAP PERTEMUAN: 14 TM/150 MENIT	
STANDAR KOMPETENSI	
Kognitif	Mahasiswa memahami berbagai aspek pengetahuan teoritis tentang misiologi
Afektif	Mahasiswa memiliki kesadaran tentang tanggungjawab orang Kristen sebagai misionaris
Perilaku	Mahasiswa akan selalu menunjukkan kebiasaan berperilaku misioner sebagai warga gereja, masyarakat dan warga negara yang baik
KOMPETENSI DASAR	

DESKRIPSI : Mempelajari latar belakang sejarah dan arti terminologi misi dan misiologi dalam rangka memperoleh pengetahuan dasar mengenai tujuan studi misiologi guna membangun pemahaman bersama dalam masyarakat pluralis.

URUIAN DAN RINCIAN MATERI

- A. Missio Dei
- B. Misi menurut PL
- C. Misi menurut Kitab Injil
- D. Misi menurut Surat Paulus
- E. Sejarah Misi Kristen
- F. Kontekstualisasi
- G. Perkembangan Gereja
- H. Misi dan Kebudayaan Kontemporer
- I. Misi dan Dialog Profetis
- J. Misi di Indonesia

INDIKATOR HASIL BELAJAR

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN:

Pendekatan	1.Kontekstual 2. Partisipatoris
Pengalaman Belajar	
Metode	1.Ceramah 2. Diskusi 3. Simulasi 4. Observasi
Tugas	

STANDAR PENILAIAN

TEKNIK : TERTULIS

BENTUK SOAL :

Tes Tertulis,Tes Sikap, Portofolio, Proyek, Unjuk Kerja

MEDIA

PRASYARAT : Tidak ada
<p>BUKU SUMBER /LITERATUR :</p> <p>Arianto, Widi: <i>Menjadi Gereja Misioner</i>, Yogyakarta: Kanisius/Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.</p> <p>Bevans, Stephen B.: <i>Models of Contextual Theology</i>, Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.</p> <p>Bosch, David: <i>Transformasi Misi Kristen</i>, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.</p> <p>Hesselgrave, David J./Rommen, Edward: <i>Kontekstualisasi: Makna, Metode, dan Model</i>, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.</p> <p>Shenk, Wilbert R.: <i>Changing Frontiers of Mission</i>, Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999.</p>

Penutup

Dengan pemaparan di atas diharapkan kita dapat menyusun dan merevisi Kurikulum Inti Prodi S1 Misiologi menjadi kurikulum yang baik di masa mendatang. Selain itu diharapkan juga akan tercipta silabus untuk setiap mata kuliah yang ada dalam kurikulum inti tersebut.

Bagian III
Masalah Pendidikan dan
Penyuluhan Agama Kristen

9.

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN (PAK) TINGKAT DASAR BERBASIS KTSP – TINJAUAN TEOLOGIS

Makalah ini berupaya mengkaji dan menganalisa materi essensial teologi pendidikan agama kristen (PAK) tingkat dasar berbasis KTSP. Dalam rangka konsultasi dengan pimpinan lembaga pendidikan kristen tingkat dasar, Subdit Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengundang saya untuk bersama para peserta konsultasi merefleksikan teologi PAK tingkat Dasar yang berbasis KTSP. Untuk lebih memahami maksud dari judul makalah tersebut, barangkali perlu diajukan beberapa pertanyaan berikut: Apa sajakah materi essensial (baca: yang mendasar) teologi PAK tingkat dasar berbasis KTSP itu? Sebelum mengkaji dan menganalisa materi itu lebih dahulu dijelaskan apakah yang dimaksud dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu dan bagaimana mengimplementasikannya dalam teologi PAK di tingkat dasar?

Apa itu KTSP?

Pada tahun 2006 ada kebijakan baru mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini sudah diberlakukan sejak TA 2006/2007 lalu untuk menggantikan Kurikulum 1994 dan 2004. Payung hukum atas kebijakan ini adalah Permendiknas no 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta Permen no 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2010 ini diharapkan KTSP

sudah bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kekhasan kurikulum ini adalah *pertama*, disusun dan diberlakukan hanya sebatas lingkungan sekolah tertentu. *Kedua*, isi kurikulum berfokus pada materi yang berdasar pada konteks sekolah tertentu meliputi keadaan alam, dan pembuat kurikulumnya pun para penyelenggara sekolah tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada mata pelajaran, silabus, dan materi pelajaran yang berlaku umum, karena setiap sekolah memilih pelajaran, silabus, dan materi pelajaran yang sesuai dengan lingkungan, siswa dan sumber daya di setiap sekolah.

Pemberlakuan KTSP disatu pihak baik karena setiap peserta didik dan lingkungan punya karakter masalah yang berbeda-beda dan hanya bisa diatasi dengan materi serta metode yang berbeda pula. Di pihak lain, ditemukan juga kendala di sekolah menyangkut dana dan sumber daya manusia. Karena, tidak semua guru memiliki kemampuan memadai bidang manajemen pendidikan, filsafat pendidikan dan kurikulum. Kendala ini sebetulnya bisa diatasi dengan membangun kerja sama antara Kemenag (Bimas Kristen) dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan lokakarya tentang pengembangan KTSP.

Pada prinsipnya KTSP disusun sebagai kurikulum operasional sekolah berdasar standar isi dan kompetensi lulusan yang dikembangkan sesuai dengan keadaan sekolah, potensi daerah, peserta didik, standar proses, standar manajemen, standar sarpras, standar keuangan, standar lingkungan, dan standar penilaian. Melalui KTSP diharapkan guru lebih diberdayakan karena harus memikirkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain itu setiap sekolah diberi kesempatan menyusun kurikulum sendiri. KTSP menekankan jumlah bahan pelajaran dikurangi agar siswa memiliki banyak waktu meneliti secara mendalam, menghindari pengulangan bahan, menawarkan ketuntasan belajar, menyediakan materi terapan. Jadi, prinsip KTSP adalah mengharapakan siswa tahu banyak dari hal yang sedikit. Ini jauh lebih efektif dari pada Kurikulum 1994 dimana siswa tahu sedikit dari hal yang banyak.

KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan guna pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar isi dan standar kompetensi lulusan menjadi acuan utama untuk mengembangkan kurikulum. KTSP yang disusun oleh sekolah mesti diimplementasikan dalam model pembelajaran aktif dan kontekstual (*contextual teaching learning – CTL*). KTSP mengacu pada standar nasional, tapi juga mengakomodir kekayaan budaya lokal.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam penyusunan KTSP adalah (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu: memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, namun disusun secara berkesinambungan yg penuh makna, (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) relevan dengan kebutuhan hidup, (e) kurikulum mencakup seluruh dimensi kompetensi, tapi disajikan scr berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, (g) kurikulum dikembangkan dengan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah.

PAK berbasis KTSP

Bagaimanakah Pendidikan Agama Kristen tingkat Dasar dapat diaplikasikan dalam KTSP? Dalam Permendiknas no 41/2007 tentang Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dikatakan bahwa standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Menurut PP no 19/2005 tentang Standar nasional pendidikan, salah satu standar yg mesti dikembangkan ialah standar proses yang berisi kriteria minimal proses pembelajaran pd satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal. Maka, langkah awal yang harus dilakukan guru adalah pelaksanaan proses

pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Komponen RPP mencakup identitas mata pelajaran, *standar kompetensi*, *kompetensi dasar*, *indikator* pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. (Karena akan sering muncul nanti perlu dijelaskan apa itu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. *Standar kompetensi* adalah kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang dilakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. *Kompetensi dasar* merupakan pernyataan minimal/memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek mata pelajaran tertentu. *Indikator* ialah suatu kompetensi yang dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap suatu pokok bahasan. Indikator dirumuskan oleh guru saat persiapan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.)

Bagaimanakah pengembangan kompetensi peserta didik dalam PAK berbasis KTSP? Kompetensi merupakan serangkaian keterampilan atau kemampuan dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki seorang individu setelah dididik dan dilatih melalui pengalaman belajar yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi, sasaran utama proses pendidikan umumnya serta proses belajar mengajar khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah *bukanlah menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan atau pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi lulusan yang memiliki serangkaian keterampilan serta berbagai sikap dan nilai penting, yang bukan hanya bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan, tapi juga terutama untuk hidup dan bekerja di masyarakat.* Untuk mencapainya, dalam proses belajar mengajar ditekankan bukanlah ‘belajar apa yang harus dipelajari’, tapi ‘belajar bagaimana belajar’. Siswa bukanlah mempelajari ilmu atau mata pelajaran sebagai produk, tetapi sebagai proses.

Dalam KTSP digunakan pendekatan kompetensi, karena secara kodrati setiap individu sebetulnya memiliki delapan kecerdasan

(bahasa, logika, visual, kinestetik, musikal, antarpribadi, intrapribadi, natural) yang perlu dikembangkan secara seimbang, dan itu hanya mungkin dilakukan dengan menerapkan pendekatan belajar aktif.

Demikian juga dalam Pendidikan Agama Kristen selain kecerdasan kognitif perlu dikembangkan kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional, kinestetik, antar/intra pribadi. Oleh sebab itu orientasi tidak lagi terlalu berpusat pada materi, tetapi pada kompetensi. Satu individu disebut kompeten kalau (a) mampu menguasai ajaran imannya dengan menafsirkan, menganalisa dan membuat sintesa secara bertanggungjawab, (b) mampu bertindak sesuai ajaran imannya, (c) mampu berperilaku dalam berkepribadian sesuai ajaran imannya, dan (d) dapat hidup mengummat dan memasyarakat sesuai ajaran imannya.

Apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar PAK tingkat dasar berbasis KTSP itu? Secara umum kompetensi yang diharapkan dari rumpun bidang studi agama adalah “siswa beriman dan taqwa pada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalam kerangka kerukukan umat beragama.”¹⁹ Lalu, khusus untuk PAK kompetensi dasarnya adalah: (a) menanggapi kasih Allah lewat keberadaan dirinya dengan mengasihi sesama manusia, (b) mewujudkan sikap hidup yang dapat menunjukkan syukur kepada Allah, (c) memelihara ciptaan Allah dalam hidup sehari-hari, (d) menjelaskan karya Allah dalam dunia dan penyelamatan bagi manusia serta seluruh ciptaan, (e) melakukan tindakan yang dapat menunjukkan tanggungjawab pada Allah, diri sendiri, sesama dan lingkungan hidup, (f) mewujudkan nilai-nilai kristiani dalam kehidupan pribadi dan komunitas, dan (g) menyampaikan berita damai dan menjadi pembawa damai.

Semua kompetensi dasar ini mesti dipilah-pilah sesuai dengan tingkat pendidikan. Di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), misalnya,

19 Oditha Hutabarat: “Rencana Pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen di Sekolah”, dalam: Tim Diklat Sertifikasi Guru PAK di Indonesia, *Buku Panduan Pelaksanaan PLPG PAK di Indonesia 2010*, Jakarta: STT Jakarta, 2010, hal. 119.

kompetensi dasar yang diharapkan adalah (a) mulai membiasakan diri berperilaku sopan dan santun, (b) mulai membiasakan diri berdoa, (c) mulai membiasakan diri memelihara ciptaan Tuhan. Sementara di tingkat Sekolah Dasar (SD) kompetensi dasar yang diharapkan adalah (a) memahami kasih Allah melalui keberadaan dirinya, (b) menanggapi kasih Allah dengan mengasihi orang tua, keluarga dan teman, (c) beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur lewat doa dan membaca Alkitab, dan (d) memelihara ciptaan lainnya dalam hidup sehari-hari. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kompetensi dasarnya (a) menjelaskan karya Allah dan penyelamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan, (b) menginternalisasi nilai kristiani dengan menanggapinya secara nyata, (c) bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sesama, masyarakat dan gereja sebagai orang yang sudah diselamatkan. Lalu pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) para siswa diharapkan memiliki kompetensi dasar (a) mewujudkan nilai-nilai kristiani dalam pergaulan antar pribadi dan kehidupan sosial, (b) merespon berbagai bentuk kehidupan modern, perkembangan budaya dan iptek dengan mengacu pada ajaran kristen, (c) bertanggungjawab sebagai orang kristen dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan bangsa, dan (d) menyampaikan berita damai dan menjadi pembawa damai sejahtera.

Penentuan kompetensi dasar yang disebutkan di atas tentu saja harus memperhatikan beberapa aspek seperti dikemukakan oleh I.H. Enklaar/E.G.Homrighausen²⁰ berikut ini: (a) Mencari dan menentukan kompetensi dasar mesti berpangkal pada Firman Tuhan, (b) Kompetensi dasar diselaraskan dengan sifat gereja, (c) Penetapan bahan ajar harus memperhatikan konteks peserta didik, artinya bahan yang dipilih disesuaikan dengan usia anak, (d) Memperhatikan latar belakang peserta didik, (e) Bahan pengajaran disesuaikan dengan metode PAK. Bahan yang disampaikan untuk kelompok buta huruf menggunakan metode yang berbeda dengan kelompok yang terpelajar, dan (f) Sadar

20 I.H.Enklaar/E.G.Homrighausen: *Pendidikan Agama Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet 22, 2009, hal. 31-32.

senantiasa akan kebutuhan khusus peserta didik, menyelami dan memahami pergumulan dan permasalahan mereka.

PAK dan Teologi

Pertanyaan yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana Ilmu Teologi itu berperan dalam PAK? Teologi bisa dipahami sebagai kajian ilmiah yang membahas keberadaan, sifat dan tindakan Tuhan bagi keutuhan ciptaanNya. Iman Kristen menyakini bahwa Tuhan Allah merupakan Pribadi pencipta langit dan bumi dan sekaligus pemelihara ciptaanNya. Dalam kerangka itulah Dia berkomunikasi, menampakkan diri dengan berbagai cara, sehingga manusia dapat ‘berjumpa’ denganNya. Namun, perlu disadari bahwa teologi tidaklah statis, selalu dinamis, terus berkembang. Teologi mengungkapkan pengertian mengenai kehendak Allah bagi manusia dalam konteks pergumulan hidup masing-masing. Oleh karena itu, saat kita belajar teologi, sebenarnya kita sedang ‘berteologi’ (*doing theology*). Selama kita mengalami relasi dan komunikasi dengan Allah melalui Alkitab, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita sebetulnya berteologi.²¹

Apa kaitannya dengan PAK? Pendidikan Agama Kristen sebagai upaya peningkatan kualitas manusia, dipanggil untuk mengarahkan individu ke dalam pemahaman dinamis dalam persekutuan dengan Allah. PAK mesti membimbing orang untuk berkomunikasi lebih akrab dengan Tuhan, sehingga ia mampu memahami kehendakNya dalam hidup sehari-hari. PAK juga mendorong pribadi-pribadi mampu mengadakan refleksi, mengutarakan pemikiran dengan sistematis mengenai pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Dengan cara ini PAK membantu orang-orang percaya aktif berteologi.²²

Selain itu, PAK sebagai disiplin ilmu pun sangat membutuhkan refleksi dan kajian ilmu teologi. Malahan dewasa ini teologi dalam ekspresinya berusaha untuk menerjemahkan warta kristen sesuai

21 B.S.Sidjabat: *Strategi Pendidikan Kristen. Suatu Tinjauan Teologis – Filosofis*, Yogyakarta: Yayasan Andi, 1996, hal. 57-59.

22 *Ibid.*

dengan kategori kultural sezaman. Dengan mencermati isi pewartaan dan budaya, kendati mungkin dengan menggunakan bahasa teknis ilmiah, teologi merupakan media pelayanan warta injili. Refleksi-refleksi teologis berupaya mendalami problem fundamental manusia dan berupaya membawa warta kristiani dalam konteks budaya masa kini. PAK perlu mengenal buah pemikiran dan metode teologis dengan baik, supaya hasil dari ilmu teologi dapat berintegrasi dalam penelitian dan tugas pendidikan agama Kristen.²³

Memang perlu disadari aneka ragam refleksi teologis tentu saja membawa konsekuensi pemahaman teori dan praktek PAK yang beraneka ragam. Yang jelas, teologi memiliki implikasi mendalam pada pendidikan agama Kristen dan bahwa teologi yang baik mengarah pada filsafat pendidikan agama kristen yang baik pula. Randolph Crump Miller dalam bukunya *Theologies of Religious Education* (1995) berusaha mengeksplorasi hubungan yang komprehensif dan mendalam antara teologi dan PAK dengan menampilkan beberapa variasi pemikiran teologis kontemporer dan kaitannya dengan Pendidikan Agama Kristen. Buku itu, misalnya, berusaha menjelaskan bila PAK memang merupakan cabang dari teologi, maka teologi harus secara memuaskan menerangkan, dan memverifikasi apa yang terjadi secara pedagogis di dalam tindakan pendidikan agama.²⁴

Materi essensial Teologis PAK

Dari sekian banyak variasi dan gagasan teologis yang sudah ada, sedang berkembang, dan yang mungkin akan terus bertambah lagi, ada beberapa materi essensial (yang mendasar) PAK yang merupakan buah refleksi teologis. Materi-materi dasar ini perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan dalam setiap kegiatan PAK. Enklaar dan Homrighausen dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen (cet. 22, 2009) memaparkan

23 Bdk. Marinus Telaumbanua: *Ilmu Kateketik. Hakikat, Metode, dan Peserta Katekese Gerejawi*, Jakarta: Obor, 1999, hal. 23.

24 Randolph Crump Miller (ed.): *Theologies of Religious Education*, Birmingham: Religious Education Press, 1995, 1, 9.

materi dasar bagi PAK yang pernah dilaksanakan di Amerika, seperti: (a) Pengenalan akan Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara kehidupan manusia, (b) Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang rela menderita demi keselamatan umat manusia, (c) Pengenalan dan pengalaman akan Roh Kudus yang bekerja dalam batin manusia, (d) Gereja sebagai persekutuan jemaat Kristus di dunia, (e) Kesadaran sebagai bagian dari warga negara yang baik dan bertanggungjawab, (f) Pandangan hidup kristiani yang menjadi pedoman dalam bertindak di dunia sekitarnya, (g) Warisan agama kristen berisi pokok kepercayaan Kristen yang tertuang dalam pengakuan iman ekumenis.²⁵ Ini merupakan contoh betapa materi teologis untuk PAK bisa beragam sesuai dengan kondisi umat dan daerahnya masing-masing. Ketujuh materi ini bila dilihat dalam konteks umat dan masyarakat Indonesia barangkali masih harus direvisi lagi.

Akan tetapi, berkaitan dengan PAK tingkat Dasar berbasis KTSP, materi/bahan kajian esensial dalam pendidikan agama kristen mulai dari tingkat dasar hingga menengah mengacu pada dua aspek, yaitu:

- (a) *Aspek hubungan timbal balik antara Allah dengan manusia* dan hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam sekitar. Disini dibahas Allah Tritunggal dan karyaNya. Dengan harapan bahwa siswa memahami, menghayati, dan mengimani karya Allah, penyelamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan dalam Yesus, serta melakukan tindakan yang dapat menunjukkan tanggung jawab kepada Allah, sesama, diri sendiri dan alam sekitar.
- (b) *Aspek nilai-nilai kristiani*. Siswa memahami, menghayati, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kristiani. Pemahaman, penghayatan, dan perilaku ini merupakan wujud tanggapan manusia terhadap kasih Allah dalam rangka menanggapi kasih Allah melalui keberadaan dirinya dengan mengasihi sesama tanpa memandang status sosial, agama, ras, dan etnis.

25 I.H. Enklaar/E.G.Homrighausen, *op.cit.*, hal. 33-34.

Kedua aspek ini kemudian dijabarkan dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dengan tujuan agar tercapai transformasi nilai-nilai kristiani dalam kehidupan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SK dan KD memberi ruang yang sama pada peserta didik dengan keunikan yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman iman kristiani sesuai dengan tingkat kemampuan dan kreativitas masing-masing siswa. SK dan KD merupakan pendamping dan pembimbing peserta didik dalam bertemu dengan Tuhan Allah, lalu mengekspresikan pertemuan itu dalam kehidupan harian. Peserta didik belajar memahami, bergaul dengan Tuhan secara akrab layaknya seperti seorang Sahabat dalam hidup mereka.

Sejalan dengan hakekat PAK sebagaimana dirumuskan dalam lokakarya Strategi PAK di Indonesia (1999) sebagai “usaha yang dilakukan secara terencana dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan bantuan Roh Kudus dapat menghayati kasih Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang nyata dalam hidup sehari-hari, terhadap sesama dan lingkungan hidupnya...”, maka *PAK pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan kabar baik yang tersaji dalam dua aspek yang sudah disebutkan di atas: Aspek Allah Tritunggal dan karyanya, dan Aspek nilai-nilai Kristiani*. Jadi intinya, SK dan KD PAK di tingkat dasar dan menengah secara holistik dikembangkan dari ajaran Allah Tritunggal dan karyaNya. Pemahaman terhadapnya mesti tampak dalam nilai-nilai kristiani yang terwujud dalam kehidupan harian peserta didik.

Rumusan SK dan KD PAK tingkat dasar dibatasi pada aspek yang secara substansial mendorong terjadinya transformasi dalam hidup peserta didik khususnya dalam penghayatan nilai iman kristiani. Fokus SK dan KD berpusat pada kehidupan manusia, dan iman berfungsi sebagai cahaya yang menerangi kehidupannya. Pembahasan materi dimulai dari lingkup paling kecil yakni manusia sebagai ciptaan Allah, lalu keluarga, teman, lingkungan sekitar, dan dunia dengan segala dinamikanya.

Berikut ini ditampilkan tujuan, fungsi, standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PAK tingkat Sekolah Dasar sebagai contoh bagaimana materi esensial teologis tampak dalam PAK tingkat dasar berbasis KTSP.

- (1) Tujuan mata pelajaran PAK di SD: (a) Memperkenalkan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan karya-karyaNya agar iman peserta didik bertumbuh, dan meneladani Allah Tritunggal dalam hidupnya. (b) Menanamkan pemahaman tentang Allah dan karyaNya kepada peserta didik, sehingga mampu memahami dan menghayatinya. (c) Menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggungjawab dan berakhlak mulia di tengah masyarakat pluralistik.
- (2) Fungsi mata pelajaran PAK di SD: (a) Memampukan peserta didik memahami kasih dan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. (b) Membantu peserta didik mentransformasikan nilai-nilai kristiani dalam hidup sehari-hari.
- (3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PAK pada Tingkat Sekolah Dasar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).²⁶

Kelas 1 (semester 1)

Standar Kompetensi (SK): Menerima dan mensyukuri keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah dalam relasinya dengan ciptaan lain.

Kompetensi Dasar (KD): (a) Menerima keberadaan dirinya sebagai pemberian Allah, (b) Menjawab kasih Allah dengan cara mengasihi keluarganya.

Kelas 1 (semester 2)

SK: Menerima dan mensyukuri keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah dalam relasinya dengan ciptaan lain.

KD: (a) Mensyukuri alam ciptaan Allah dan isinya, (b) Mensyukuri hidup bersama orang lain.

²⁶ Badan Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas no. 23/2006.

Kelas 2 (semester 1)

SK: Menerapkan makna mengasihi dan menghargai manusia dalam kepelbagaian dan perbedaan yang ada.

KD: (a) Mensyukuri kepelbagaian budaya, suku, agama dan bangsa, (b) Mengasihi teman dan guru serta sesama di sekolah dan di sekitarnya.

Kelas 2 (semester 2)

SK: Menerapkan makna mengasihi dan menghargai manusia dalam kepelbagaian dan perbedaan yang ada.

KD: (a) Menghargai teman dan guru serta sesama tanpa memandang perbedaan, (b) Menolong orang yang sedang menderita yang ada di sekitarnya.

Kelas 3 (semester 1)

SK: Mendeskripsikan arti mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga serta menunjukkan syukur melalui tanggungjawabnya dalam keluarga dan sesama.

KD: (a) Mensyukuri pemeliharaan Allah pada setiap anggota keluarga, (b) Memberikan yang terbaik bagi keluarga.

Kelas 3 (semester 2)

SK: Mendeskripsikan arti mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga serta menunjukkan syukur melalui tanggungjawabnya dalam keluarga dan sesama.

KD: (a) Turut serta menciptakan hidup rukun dalam keluarga dan sesama, (b) Memelihara alam ciptaan Allah.

Kelas 4 (semester 1)

SK: Memahami dan mengakui kemahakuasaan Allah dalam wujud tindakan manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Allah.

KD: (a) Memahami kemahakuasaan Allah, (b) Mengakui keterbatasannya sebagai manusia dan ketergantungannya pada kemahakuasaan Allah.

Kelas 4 (semester 2)

SK: Memahami dan mengakui kemahakuasaan Allah dalam wujud tindakan manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Allah.

KD: (a) Memahami wujud tindakan manusia yang sepenuhnya bergantung pada Allah, (b) Mensyukuri kemahakuasaan Allah.

Kelas 5 (semester 1)

SK: Menjelaskan bahwa manusia berdosa, tetapi diselamatkan Allah melalui penebusan Yesus Kristus.

KD: (a) Menjelaskan bahwa manusia itu berdosa, (b) Menunjukkan kerinduan memohon ampun.

Kelas 5 (semester 2)

SK: Menjelaskan bahwa manusia berdosa, tetapi diselamatkan Allah melalui penebusan Yesus Kristus.

KD: (a) Menjelaskan bahwa Allah adalah penyelamat manusia, (b) Menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah diselamatkan.

Kelas 6 (semester 1)

SK: Menerapkan makna ibadah yang sesungguhnya, khususnya dalam seluruh aktivitas hidup manusia.

KD: (a) Memahami dan menghayati makna ibadah, (b) Memahami makna kegiatan sehari-hari sebagai ungkapan syukur kepada Allah.

Kelas 6 (semester 2)

SK: Menerapkan makna ibadah yang sesungguhnya, khususnya dalam seluruh aktivitas hidup manusia.

KD: (a) Memahami makna kegiatan sehari-hari sebagai ungkapan syukur kepada Allah, (b) Melayani Allah dan sesama sebagai ungkapan syukur kepada Allah.

Penutup

Dari contoh pemaparan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari kelas 1 hingga 6 diatas terlihat dengan jelas aspek hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan sesamanya dan hasil karya Allah. Sementara aspek mengenai nilai-nilai kristiani tampaknya akan muncul dalam SK dan KD untuk tingkat menengah pertama dan atas.

10

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM PAK

Pendahuluan

Kemajuan *Information and Communication Technology* (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong terjadinya banyak perubahan dalam peningkatan mutu pembelajaran berbasis kelas, termasuk dalam bidang Pendidikan Agama Kristen. Dengan memanfaatkan TIK, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. TIK sangat memungkinkan digunakan dalam kelas, sehingga mutu pembelajaran lebih meningkat. Dengan memanfaatkan TIK pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. TIK sangat memungkinkan digunakan dalam kelas, sehingga mutu pembelajaran lebih meningkat.

TIK memberikan kepada siswa dan para guru PAK banyak manfaat, diantaranya menyangkut fleksibilitas program Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen yang dapat dibuat lebih menarik dan berkesan. Integrasi TIK pada PAK meningkatkan kualitas pendidikan agama. Dampaknya pada penyelenggaraan PAK adalah mendorong siswa dan guru lebih kreatif dan mandiri dalam belajar yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pembelajaran.

Permasalahan yang mau dibahas dalam makalah ini adalah *sejauh manakah manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kelas bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen?*

Untuk menjawab persoalan itu maka akan dibahas *pertama*, manfaat kehadiran TIK dalam pendidikan pada umumnya. *Kedua*, bagaimana penerapan dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. *Ketiga*, usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan pemanfaatan TIK dalam peningkatan mutu pembelajaran PAK berbasis kelas?

1. *Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pendidikan*

Pendidikan bermutu ditentukan oleh berbagai macam faktor. Salah satu unsur yang mesti diperhatikan dalam merancang proses pembelajaran yang efektif adalah *media pembelajaran*. Karena proses pembelajaran adalah juga proses komunikasi, maka efektifitas serta mutu pembelajaran ditentukan oleh unsur-unsur *komunikasi* seperti sumber belajar, audiens, media dan umpan balik. Media komunikasi merupakan suatu alat dimana komunikator memakainya untuk mengirim pesan kepada komunikan. Media komunikasi dalam pendidikan biasa disebut juga sebagai *media pengajaran*. Media komunikasi merupakan segala bentuk alat dan sumber belajar yang digunakan untuk membantu memperlancar proses belajar mengajar.

Ada *tiga peranan media dalam pendidikan*: a) Media pembelajaran berfungsi sebagai penyampaian pesan khusus, b) Sebagai pembentuk lingkaran perantara dimana media membantu siswa melakukan eksplorasi dan membentuk pemahaman suatu pengetahuan, c) Mengembangkan kemampuan kognitif, dimana media dipergunakan sebagai model atau perluasan mental kemampuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang paling efektif digunakan untuk mencapai mutu pendidikan dalam memasuki era globalisasi sekarang ialah dengan menggunakan *teknologi informasi dan komunikasi (TIK)*.

TIK telah berkembang dengan pesat, sehingga telah merupakan gejala dunia. TIK sebagai suatu produk dan proses telah berkembang sedemikian rupa, sehingga memengaruhi setiap kehidupan kita

dalam berbagai bentuk aplikasi. Penanganan TIK secara profesional memerlukan tenaga yang terdidik. Dalam lingkup pendidikan tenaga ini merupakan tenaga ahli dalam teknologi pendidikan. Dalam pendidikan di sekolah penggunaan TIK dimulai dengan titik pangkal strategis, yakni *guru*. Namun, TIK tidak dapat menggantikan kedudukan guru, melainkan membantu untuk menyimpan dan menyajikan konsep, prinsip dan prosedur yang ingin diajarkan.²⁷

Dalam lembaga pendidikan, berbagai bentuk TIK, misalnya (1) *perpustakaan elektronik* yang merupakan arsip buku-buku. Dibantu jaringan internet dapat dengan mudah mengubah konsep perpustakaan yang pasif menjadi lebih agresif dalam berinteraksi dengan penggunanya, (2) *surat elektronik (e-mail)*: memudahkan guru dan siswa, orangtua berinteraksi. Dalam kegiatan belajar siswa yang mengalami kesulitan dapat bertanya lewat *e-mail*. (3) *Ensiklopedia* yang menggunakan CD-ROM tidak hanya berisi tulisan dan gambar, tapi juga audio dan video. (4) Sistem distribusi *bahan ajar elektronik* (digital), (5) *tele-edukasi dan pelatihan jarak jauh* guna memudahkan pertukaran data. (6) *Pengelolaan sistem informasi*, dan (7) video *teleconference*.²⁸

Sesuai dengan hakekat dan karakteristiknya ada tujuh peranan utama TIK dalam dunia pendidikan. *Ketujuh peranan* itu terkait erat dengan 4 *pilar* utama penopang arsitektur sistem institusi pendidikan yang baik (a. konten dan kurikulum, b. proses belajar mengajar, c. SDM dan kultur, d. fasilitas dan jaringan) dan 3 *entitas* pendukung operasional (a. infrastruktur/suprastruktur, b. kegiatan operasional terpadu, dan c. sistem manajemen mutu).

Adapun *ketujuh peranan TIK* itu adalah sebagai (1) gudang ilmu pengetahuan karena pemanfaatan jaringan internet pengajar dan siswa dapat mengakses banyak sumber pengetahuan, (2) alat bantu pengajar dan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran seperti penggunaan

27 Yusufhadi Miarso: *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, 495-496.

28 *Ibid.*, 671-672.

komputer dan sejumlah aplikasinya. (3) standar kompetensi dan keahlian yang mesti dimiliki oleh pengajar. (4) peluang terjadinya transformasi sistem pendidikan masa depan melalui konsep yang tak lagi tergantung pada batasan fisik. (5) alat penunjang manajemen pendidikan, (6) sarana memadukan beragam fungsi/proses pelaksanaan administrasi pendidikan menyangkut sumber daya pembelajaran (pengajar, anak didik, ruang kelas, peralatan, dll). (7) infrastruktur/suprastruktur pendidikan, yang berarti lembaga punya akses pada jaringan seluruh infrastruktur.

TIK memberikan pengaruh yang besar kepada dunia pendidikan, secara khusus dalam proses pembelajaran. TIK sebagai media pendidikan umumnya menggunakan sarana-sarana seperti komputer, internet, telepon, e-mail, dll. Selain dengan tatap muka di kelas, dengan menggunakan media tersebut interaksi antara guru dan murid masih tetap bisa terjalin. Guru misalnya bisa memberikan pelayanan tanpa harus saat itu juga bertemu langsung dengan siswa. Demikian juga siswa bisa mendapatkan lebih banyak informasi melalui CD-ROM atau jaringan internet.

Pada saat ini sedang berkembang proses pengajaran yang dilaksanakan dengan internet yang disebut dengan *electronic learning* (*e-learning*). *E-learning* menyampaikan pembelajaran yang memiliki jangkauan luas dengan landasan tiga kriteria berikut: a) jaringan memiliki kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusikan serta membagi materi pelajaran/informasi, b) materi sampai ke pengguna melalui komputer yang memiliki jaringan internet, c) memiliki fokus pada pandangan yang lebih luas mengenai pembelajaran, jadi tidak hanya berpatokan pada paradigma belajar tradisional.

Apa dampaknya bagi pembelajaran?

Dengan perkembangan TIK terjadi pergeseran pandangan mengenai pembelajaran. Pandangan model tradisional yang di sebagian besar sekolah masih berlangsung hingga sekarang pembelajaran dilihat

sebagai (1) suatu yang sulit, (2) upaya mengisi kekurangan siswa, (3) proses transfer dan penerimaan informasi, (4) proses individual, (5) proses linear, (6) kegiatan penjabaran materi pelajaran pada satuan lebih kecil namun menjadi lebih terisolasi. Sementara model pembelajaran berbasis TIK belajar dilihat sebagai: (1) proses alami, (2) proses sosial, (3) proses aktif sekaligus pasif, (4) proses linear sekaligus tidak linear, (5) proses yang berlangsung integratif dan kontekstual, (6) aktivitas yang memperhatikan kecakapan, minat dan budaya siswa.

TIK mampu *mengubah peranan guru dan murid dalam pembelajaran*. Peranan guru berubah dari (1) penyampai pengetahuan, ahli/sumber utama informasi/jawaban, *menjadi* fasilitator, pelatih, kolaborator pembelajaran, dan mitra belajar; (2) pengendali dan pengarah semua aspek pembelajaran, *menjadi* pemberi lebih banyak alternatif/tanggung jawab pada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Sementara peranan siswa dalam pembelajaran juga mengalami perobahan dari (1) penerima informasi pasif menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran; (2) mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi menghasilkan dan berbagi pengetahuan, (3) pembelajaran sebagai aktivitas individual menjadi pembelajaran kolaboratif dengan siswa lainnya.

Manfaat TIK jelas kelihatan dalam proses dan hasil pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. *TIK memungkinkan terjadinya individuasi, akselerasi, pengayaan, perluasan, efektivitas dan produktivitas pembelajaran yang tentu meningkatkan kualitas pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia*. Penggunaan TIK membuat siswa lebih bersemangat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Untuk itu perlu kreativitas dan kemandirian, karena (1) kreativitas memberi peluang pada setiap individu mengaktualisasikan dirinya, (2) kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam memecahkan masalah, (3) kreativitas memberi kepuasan hidup, (4) kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kwalitas hidup baik

dari segi kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Pembelajaran dengan bantuan TIK memungkinkan dapat menghasilkan karya baru yang orisinal dan perluasan wawasan.

Perlu dukungan guru dan orangtua

Dalam proses pembelajaran berbasis TIK siswa membutuhkan dukungan guru dan orangtua. Peranan guru ialah memfasilitasi siswa dan menjadi manajer pembelajaran, dimana guru bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran, tapi hanya salah satu sumber informasi. Karena itu guru mengalami *perluasan peranan*, misalnya sebagai (1) pelatih: memberi peluang seluas-luasnya bagi siswa mengembangkan cara pembelajaran sesuai kondisi masing-masing, (2) konselor: guru mampu mencipta situasi belajar mengajar yang interaktif, sehingga siswa punya perilaku belajar dalam suasana psikologis yang kondusif, (3) manajer: guru otonom dalam mengelola seluruh kegiatan belajar mengajar, (4) partisipan: guru berperilaku belajar dari interaksinya dengan siswa, (5) pemimpin: mampu menggerakkan siswa mencapai tujuan bersama, (6) pembelajar: terus menerus belajar dalam menyegarkan kompetensinya, (7) pengarang: selalu kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya guna tugas profesionalnya.²⁹

Setelah melihat pemanfaatan TIK bagi pendidikan pada umumnya, kini kita secara khusus hendak mengamati penerapannya dalam Pendidikan Agama dan keagamaan Kristen. Sejauh mana PAK berbasis TIK bisa diaplikasikan?

2. Penerapan dan Pemanfaatan TIK dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen

Penerapan dan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah kita. Yang *pertama* adalah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan,

29 Dahlan Abdullah: *Potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kelas*. Diakses dari internet pada Juli 2010.

“Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna”. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa “Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyesuaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh...”

Lalu yang *kedua* adalah pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikatakan bahwa *“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”*.

Yang menjadi kata kunci dari yang pertama adalah bagian penjelasan ‘pendidikan yang dilaksanakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu ...dan peserta didik dapat belajar sambil bekerja’. Hal ini dapat dimungkinkan dan terlaksana berkat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sementara pada bagian yang kedua bahwa ‘proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif’ merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pemanfaatan TIK.

Bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan kristen? Peraturan Pemerintah (PP) no. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa ‘Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya melalui mata pelajaran’ (pasal 1, ay. 1). Tujuannya adalah ‘untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni’ (pasal 2 ay.2). Sedangkan, ‘pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya’ (pasal 1, ay. 2). Bertujuan untuk ‘terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis’ (pasal 8, ayat 2).

Bila melihat PP ini, maka Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang diselenggarakan dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, masuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Nah, kembali ke persoalan intinya: *Bagaimana memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar mutu pembelajaran PAK berbasis kelas bisa semakin meningkat?*

Secara umum dalam konteks *christian education*, PAK memiliki ruang lingkup semua bentuk pelayanan pendidikan dan/atau pembinaan Kristen untuk semua lapisan usia yang menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan oleh gereja secara teratur, bertujuan, dan terus menerus. Maka, sebenarnya pelajaran Agama Kristen di sekolah atau perguruan tinggi hanya sebagian kecil dari PAK, namun menjangkau massa yang cukup besar.³⁰ Di dalam makalah ini PAK secara khusus dimaksudkan sebagai Pelajaran Agama Kristen baik di lingkungan sekolah menengah maupun di Perguruan Tinggi.

Kita melihat bahwa TIK yang dimanfaatkan dalam PAK masuk dalam kategori metode peningkatan mutu pembelajaran PAK dengan media TIK. Kekuatan TIK saat ini mendorong para insan pendidikan agama Kristen untuk memanfaatkannya. Namun, apakah kekuatan TIK ini sudah sampai pada perubahan tujuan dan isi kurikulum PAK, aktivitas belajar, sehingga penggunaan TIK ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran? Sejauh mana misalnya unsur-

30 Kadarmento Hardjowasito: Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam Konteks Masyarakat Indonesia yang Majemuk, dalam: Robert P. Borrong (ed.): *Berakar di dalam Dia dan Dibangun di atas Dia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, cet. 3, hal. 108.

unsur TIK seperti komputer, LAN (*local area network*), WAN (*wide area network*), internet, intranet, satelit, TV, CD ROM, LCD, dll dipergunakan dalam bahan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen? Dalam situasi sekarang ini kita ditantang untuk mengaplikasikan TIK dalam kurikulum PAK. Selain itu, perlu merancang proses pembelajaran PAK yang berbasis pada sebanyak mungkin jenis TIK, karena memang bahan belajar PAK dengan TIK seperti misalnya model multimedia berbasis komputer mampu menampilkan teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video, yang tentu jauh lebih memikat dan menarik minat para siswa, dari pada hanya dengan cara penjelasan verbal semata.

Oleh sebab itu pembelajaran PAK perlu menggunakan TIK sebagai alat dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan kenyamanan belajar. Obyeknya merupakan layanan pembelajaran yang lebih baik, menarik, dan interaktif. Hasil akhirnya peningkatan prestasi dan kecakapan akademik peserta didik dan pengurangan biaya, waktu, dan tenaga untuk proses pembelajaran. Bahan pembelajaran PAK yang dirancang dengan baik dan profesional memperhatikan ciri-ciri multimedia. Artinya, bahan pelajaran PAK tersebut selain memuat teks, juga memuat gambar, grafik, animasi, simulasi, audio, dan video. Pemilihan warna yang baik dan tepat akan meningkatkan penampilan di layar monitor. Hal ini menjadikan bahan pelajaran PAK menjadi lebih menarik, berkesan, interaktif, yang memungkinkan siswa selalu ingat mengenai apa yang dipelajarinya.

Selain itu catatan prestasi siswa yang juga dirancang secara multimedia amat bermanfaat bagi proses umpan balik (*feed back*) dan pengukuhan (*reinforcement*). Pemeriksaan dan pemberian skor atas hasil evaluasi belajar PAK dilakukan secara otomatis, transparan.

Tantangan apa yang muncul dalam model pembelajaran PAK dengan cara multimedia ini? Beberapa hal ini perlu dibenahi, a.l. (1) infrastruktur: memerlukan ketersediaan komputer, LCD Proyektor, jaringan internet, homepage para guru agama, perpustakaan elektronik (e-library); (2) sumberdaya manusia: harus melek komputer yang

memiliki pengetahuan dasar mengenai komputer seperti pengoperasian program aplikasi, konteks sosial penggunaan komputer, paham apa dan bagaimana komputer bekerja, (3) bahan pembelajaran mencakup pengembangan metode dan konsep belajar, media pembelajaran, pengembangan profesi guru agama Kristen dan sumber belajar.

3. *Efektifitas Pemanfaatan TIK dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran PAK Berbasis Kelas*

Usaha apa yang bisa kita lakukan secara konkrit agar pemanfaatan TIK dalam peningkatan mutu pembelajaran PAK berbasis kelas bisa berlangsung secara efektif?

Secara konkrit pelaksanaan pembelajaran PAK berbasis TIK misalnya dengan secara multimedia di dalam kelas memiliki tiga syarat minimal ini: (1) kegiatan pembelajaran dilakukan melalui jaringan komputer, (2) tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat digunakan oleh para siswa melalui CD-ROM, dan (3) tersedia layanan para guru sebagai tutor yang membantu siswa bila mengalami kesulitan. Pemanfaatan TIK di ruangan kelas memang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan. Kendati pun demikian peranan guru agama Kristen tetap tidak dapat digantikan oleh alat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi betapapun canggihnya adalah keteladanan hidup dan spiritualitas para guru agama Kristen.

Tidak bisa disangkal, TIK memberikan pengaruh yang besar kepada dunia pendidikan, secara khusus dalam proses pembelajaran PAK. TIK sebagai media pendidikan umumnya menggunakan sarana-sarana seperti komputer, internet, video, e-mail, dll. Selain dengan tatap muka di kelas, dengan menggunakan media tersebut interaksi antara guru dan murid masih tetap bisa terjalin. Guru misalnya bisa memberikan pelayanan tanpa harus saat itu juga bertemu langsung dengan siswa. Demikian juga siswa bisa mendapatkan lebih banyak informasi melalui CD-ROM atau jaringan internet. Manfaat

penggunaan TIK bagi siswa adalah: (a) Memberikan peluang untuk berkembangnya kreativitas dan kemandirian siswa, dan (b) siswa memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat meningkatkan wawasannya.

Ronald A. Sarno memaparkan beberapa sarana audio visual yang relevan sebagai bagian dari TIK dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAK, antara lain: fotografi, siaran radio, film, televisi, tape recording, dan komputer. Namun dia menggarisbawahi beberapa tahapan unsur penting yang perlu mendapat perhatian: 1) Guru dan para siswa hendaknya pertama-tama menyaksikan materi audiovisual yang diproduksi secara profesional. 2) Setelah menontonnya mereka mendiskusikan materi audiovisual. 3) Guru Agama Kristen menekankan betapa sikap meleak media sangat berpengaruh bagi para siswa dengan menginstruksikan bagaimana terjadinya efek media, dan memfasilitasi berbagai produk media sebagai bagian dari peserta didik.³¹

Mengingat beragamnya kondisi sekolah di Indonesia saat ini yang tentu tingkat ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya manusia juga berbeda, maka penerapan TIK dalam pembelajaran PAK dapat dibagi atas berbagai fase. *Pertama*, fase *emerging*: tahap dimana semua insan pendidikan menaruh minat pada TIK yang tampak dalam dukungan pada peningkatan performa kerja. *Kedua*, *applying*: tahapan insan pendidikan mulai belajar menggunakan TIK. Pada tahap ini kebutuhan meningkatkan kualitas pembelajaran tradisional model kelas dengan TIK mulai dirasakan sebagai kebutuhan. *Ketiga*, *infusing*: para insan pendidikan mulai mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan TIK, yang tampak dalam kemampuan menyediakan fasilitas belajar berbasis TIK bagi peserta didik. *Keempat*, *transforming*: secara spesifik sudah menggunakan TIK untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan.³²

31 Ronald A. Sarno: *Using Media in Religious Education*, Birmingham: Religious Education Press, 1987, hal. 169, 181-182.

32 S. Majumdar (ed.): *Regional Guidelines for Teacher Development for Pedagogy Technology Integration*, Bangkok: Unesco, 2005.

Bila kita amati, sebagian besar lembaga pendidikan yang mengajarkan PAK masih berada pada tahapan *applying*, artinya mulai belajar menggunakan TIK dan ingin meningkatkan kualitas pembelajaran model tradisional dengan TIK. Namun menurut saya, proses pembelajaran PAK mesti secepatnya diusahakan sampai pada tahapan *transforming*, yang menggunakan TIK bukan hanya untuk membantu proses pembelajaran, tapi juga dalam pengelolaan pendidikan secara profesional.

4. Penutup

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin maju dewasa ini, dunia pendidikan pada umumnya dan dunia Pendidikan Agama Kristen (PAK) khususnya mau tidak mau harus memanfaatkannya secara maksimal. Pemanfaatan TIK guna peningkatan mutu pembelajaran PAK berbasis kelas bisa dilakukan secara optimal bila para guru agama Kristen sungguh-sungguh menguasai sarana TIK tersebut dan mempersiapkannya dengan baik sebelum proses belajar mengajar dimulai di dalam kelas. Penguasaan penggunaan TIK dan persiapan yang matang akan membuat pembelajaran PAK lebih menarik dan menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif, sebab materi yang baru saja mereka dengar masih bisa terus dipelajari berulang-ulang. Mutu pembelajaran PAK semakin meningkat karena peserta didik memperoleh bahan pelajaran tidak lagi dengan sistem satu arah, tapi sistem dua arah (*interaktif*).

5. Bahan Diskusi Kelompok:

- (a) Jenis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) manakah yang pernah Anda gunakan dalam proses pembelajaran bidang PAK selama ini?
- (b) Sejauh mana TIK yang Anda gunakan mampu meningkatkan mutu pembelajaran PAK di dalam kelas?
- (c) Kendala apa yang Anda alami selama menerapkan TIK dalam mengajarkan PAK di dalam kelas, dan bagaimana seharusnya mengantisipasi kendala tersebut?

BERPIJAK PADA REALITAS
tantangan pastoral, misiologi dan
pendidikan agama kristen

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dahlan: *Potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kelas*. Diakses dari internet Juli 2010.
- Hardjowasito, Kadarmento: Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam Konteks Masyarakat Indonesia yang Majemuk, dalam: Robert P. Borrang (ed.): *Berakar di dalam Dia dan Dibangun di atas Dia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, cet. 3, 2002, 107-123.
- Majumdar, S. (ed.): *Regional Guidelines for Teacher Development for Pedagogy Technology Integration*, Unesco, Bangkok, 2005.
- Miarso, Yusufhadi: *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Sarno, Ronald A.: *Using Media in Religious Education*, Religious Education Press, Birmingham, 1987.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2007.

11.

PENYULUHAN AGAMA DALAM KONTEKS MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Berhadapan dengan situasi kemajemukan budaya masyarakat Indonesia, para penyuluh Agama Katolik ditantang untuk selalu kreatif dalam memberikan penyuluhan agama kepada para warganya. Para penyuluh ini diharapkan mampu mengelola perbedaan dan kemajemukan budaya bangsa, dan bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan yang merusak persatuan dan kesatuan.

Dalam makalah ini pertama-tama diuraikan pemahaman dasar multikulturalisme/kemajemukan dan sejauh mana paham kristen tentangnya. Kemudian akan dipaparkan situasi multikulturalisme di Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan dibahas multikulturalisme dalam kaitannya dengan penyuluhan agama Katolik. Penyuluhan sebagai pewartaan mesti selalu disadari oleh setiap anggota penyuluh. Pada akhirnya penulis menawarkan langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para penyuluh dalam masyarakat majemuk baik di tataran konsep maupun melalui tindakan konkret di lapangan.

1. Multikulturalisme: pemahaman dasar

a. Pengertian multikulturalisme

Istilah “multikulturalisme” berasal dari kata Inggris “*multiculturalism*” yang akarnya bisa dilihat dari kata Latin “multi” (banyak) dan “cultura” (budaya). Jadi secara harafiah “multikulturalisme” adalah suatu paham yang menganut banyak budaya, atau secara ringkas disebut “keberagaman budaya”. Menurut

Kamus Sosiologi karya Soerjono Soekanto, “multikultural” diartikan sebagai “berkenaan dengan lebih dari dua kebudayaan”. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “multikulturalisme” adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat multikultural bisa diartikan suatu komunitas masyarakat yang terdiri dari berbagai macam identitas, baik suku, agama, ras dan nilai atau norma.

Multikulturalisme mula-mula digunakan di Kanada dengan pengaruh relativisme budaya dari Amerika dan antropologi struktural Prancis sejak tahun 1960an untuk menggantikan istilah “bikulturalisme” dan sejak 1970an makin ramai dibicarakan dalam diskusi di kancah internasional. Khususnya sejak tahun 1980an multikulturalisme menjadi tema diskusi hangat dalam kaitannya dengan persoalan pluralisme, heterogenitas kehidupan sosial sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi.³³ Gagasan multikulturalisme mengacu pada kenyataan bahwa masyarakat memiliki budaya yang beragam. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.

Ada dua alasan mengapa multikulturalisme menjadi isu penting. *Pertama*, multikulturalisme menjadi diskusi luas di kalangan akademisi khususnya pada era poskolonial. Penekanan poskolonial pada otonomi lokal, dan hibrida kultural dianggap sejalan dengan gagasan multikulturalisme yang mengedepankan diversitas kultural. *Kedua*, multikulturalisme menjadi model alternatif kebijakan budaya yang mulai banyak diterapkan di sejumlah negara seperti Australia dan Amerika.³⁴

33 Hans-Joachim Hoehn, “Multikulturelle Gesellschaft” dalam Walter Kasper et.al. (ed.): *Lexikon fuer Theologie und Kirche*, Herder 2006, hal. 519-520.

34 Hikmat Budiman (ed.), Hak Minoritas. *Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, The Interseksi Foundation, 2005, hal. 3.

Multikulturalisme berkaitan erat dengan keanekaragaman. Keanekaragaman dalam masyarakat modern memiliki beberapa bentuk. *Pertama*, keanekaragaman *subkultural*: walau para anggotanya punya satu budaya umum, beberapa dari mereka menjalankan keyakinan dan praktek yang berbeda atau menempuh cara hidup mereka sendiri yang relatif sangat berbeda, mis. Kaum gay, lesbian. *Kedua*, keanekaragaman *perspektif*: para anggotanya sangat kritis terhadap beberapa nilai sentral kebudayaan yang berlaku dan berusaha untuk menyatakannya kembali di sepanjang garis kelompok yang sesuai, mis. Kaum feminis menyerang kaum patriarkhat, masyarakat religius serang kaum sekuler, pecinta lingkungan serang kaum teknokratis. *Ketiga*, keanekaragaman *komunal*: komunitas yang terorganisir rapi menjalankan hidup dengan system keyakinan yang berlainan, mis. Orang Yahudi, kaum Gipsi. Jadi, bila disebut “masyarakat multikultural”, maka umumnya akan merujuk pada ketiga keanekaragaman yang di atas.³⁵

Ada empat fakta penting yang perlu diketahui dalam masyarakat multikultural kontemporer. *Pertama*, berkat dinamika ekonomi modern, masyarakat multikultural tidak mau menjalani kehidupan yang terisolasi. Karena gagasan liberal dan demokratis, mereka menolak status politik rendahan dan menuntut hak politik yang setara. *Kedua*, Berkat perkembangan ilmu sosiologi, psikologi budaya, maka kebudayaan sungguh menjadi perhatian bagi masyarakat, sekaligus membawa masyarakat pada penerimaan lebih besar atas perbedaan kultural. Menghormati kebudayaan seseorang merupakan bagian integral prinsip kesetaraan warga. *Ketiga*, Masyarakat multikultural kontemporer secara integral terikat dengan proses globalisasi ekonomi dan budaya yang sangat kompleks. Teknologi dan barang hasil teknologi bebas bergerak (mis. teknologi informasi, seperti fitur-fitur HP yang terus berkembang) dan secara

35 Bhiku Parekh: *Rethinking Multiculturalism. Keberaga man Budaya dan Teori Politik*, Kanisius, 2008, hal. 16-17.

kultural sebetulnya tidak netral. Berkat arus informasi yang begitu deras itu, tidak ada masyarakat yang mampu menutup diri darinya. Pengaruh eksternal itu sedemikian halus, tanpa sadar masyarakat akan terbawa arus oleh dampak globalisasi. *Keempat*, Masyarakat multikultural kontemporer telah bangkit melawan homogenisasi kultural, yang menyamakan kesatuan dengan keseragaman. Tidak mengherankan mereka memunculkan permasalahan yang tidak dihadapi masyarakat terdahulu, seperti persoalan hak minoritas, bagaimana kita berkomunikasi lintas budaya, serta menyelesaikan perbedaan antar budaya.³⁶

Menurut Bhikhu Parekh pemahaman multikulturalisme hendaknya dilihat pertama-tama bukan sebagai doktrin politik dengan muatan programatik, juga bukan sebagai aliran filosofis dengan teori yang khas tentang tempat manusia di dunia, melainkan *lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia*.³⁷ Namun, bagi Parekh, ada tiga pandangan mendasar multikulturalisme yang perlu disadari. *Pertama*, manusia terikat secara kultural dalam arti mereka tumbuh dan berkembang dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural. Namun hal itu bukan berarti bahwa manusia sepenuhnya dideterminasi oleh kebudayaannya. *Kedua*, budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi tentang kehidupan yang berlainan. *Ketiga*, setiap budaya secara internal bersifat plural, dan merefleksikan sebuah dialog diantara tradisi dan jalinan pemikiran yang berbeda. Setiap budaya membawa bagian-bagian dari budaya lain di dalam dirinya. Parekh memang tidak merekomendasikan multikulturalisme menjadi doktrin politik, tapi praktek multikulturalisme jauh lebih mudah dilihat dalam konteks kebijakan politik sebuah negara.³⁸

36 *Ibid.*, hal. 21-23.

37 Bhikhu Parekh, "What is Multiculturalism?", <http://www.india-seminar.com/1999/484/484%parekh.htm> yang dikutip dalam Hikmat Budiman, *Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, The Interseksi Foundation, 2005, hal. 3.

38 *Ibid.*, hal. 4.

Karena multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dan alat untuk meningkatkan derajat manusia, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Istilah multikulturalisme tidak lagi memadai bila dipahami hanya sebatas “paham banyak budaya”. Untuk lebih memudahkan pemahaman perlu diperhatikan pendapat Rob Reich yang membedakan multikulturalisme *deskriptif* dan multikulturalisme *normatif*. *Multikulturalisme deskriptif* adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan (pluralistik). Sementara *multikulturalisme normatif* berkaitan erat dengan dasar-dasar moral, yakni adanya ikatan moral para warga dalam lingkup negara dalam melakukan suatu yang menjadi kesepakatan bersama.³⁹

Konon sebelum muncul teori multikulturalisme, di Amerika pernah dikembangkan teori “*melting pot*” (tempat melebur) dan teori “*salad-bowl*” (tempat salada), namun keduanya memiliki kelemahan dan kegagalan. Dengan teori “*melting pot*” diusahakan untuk menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya asal masing-masing. Dengan teori “*salad bowl*”, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Maka, multikulturalisme mengoreksi kelemahannya antara lain dengan: (1) membagi pergerakan budaya menjadi dua, yakni: (a) ruang publik yang terbuka bagi seluruh etnis/kelompok/umat untuk mengekspresikan dirinya dalam suatu tatanan budaya bersama. (b) ruang privat yang digunakan masing-masing etnis/kelompok mengekspresikan budayanya secara leluasa, (2) Mengembangkan kebanggaan sebagai satu bangsa dan satu negara, (3) menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas.⁴⁰

39 Firman Nugraha, “Wawasan Multikultural dalam Penyuluhan Agama”, dalam: <http://firman-nugraha.blogspot.com/2010/03/wawasan-multikultural-dalam-penyuluhan.html> pada Jumat, 16 April 2010 pukul 10.44 WIB.

40 *Ibid.*

b. Multikulturalisme dalam perspektif Kristen

Secara historis kekristenan juga lahir dari masyarakat multikultural, muncul dari dua lingkungan tradisi yang berlainan, yaitu tradisi Yahudi dan pemikiran Yunani. Selain itu, iman Kristen sejak awal juga merupakan salah satu dari sejumlah iman yang dihayati di lingkungan kekaisaran Romawi. Komunitas Kristen purba mesti hidup di tengah masyarakat yang mayoritas masih memelihara tradisi keyahudian. Rasul Paulus dalam Galatia 3, 28 misalnya mengatakan, “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” Dalam pemahaman Kristen semua manusia adalah saudara dan saudari, dan berkat Injil segala bentuk diskriminasi disingkirkan. Terhadap tradisi pemikiran Yunani juga muncul relasi yang cukup mendalam dengan kekristenan.

Jadi, sejarah perkembangan gereja purba tidak bisa dilepaskan dari kenyataan multikultural. Gereja-gereja Timur (Ortodoks) misalnya sejak awal telah terbiasa berhadapan dengan kemajemukan. Gereja Ortodoks Syria menerima keberadaannya dengan nyaman baik di Antiokia yang merupakan bagian kekaisaran Romawi Kristen, maupun di Persia atau di India yang berada di luar kekaisaran Romawi Kristen. Gereja di Aleksandria harus berada bersama komunitas Yahudi yang mayoritas dan tradisi agama Mesir kuno. Dengan kemenangan Islam, gereja-gereja tersebut harus belajar hidup bersama sebagai bagian dari suatu negara yang didasarkan atas keyakinan religius lain, kendati negara mengizinkan gereja mempraktekkan keyakinan Kristen. Lebih jauh di Timur, gereja-gereja Nestorian di Cina dan Mongolia cepat menyadari bahwa mereka bisa belajar dari agama di sekitar mereka. Bahkan sejarah mencatat bahwa seorang imam Nestorian bernama Adam telah berhasil menterjemahkan beberapa teks penting Buddhisme.⁴¹

41 Kadarmento Hardjowasito, “Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam Konteks Masyarakat yang Majemuk”, dalam: Robert P. Borrong (Ed.) *Berakar di dalam Dia dan Dibangun di atas Dia*, BPK Gunung Mulia, 2002, hal. 111-112.

Kekristenan di India dan Cina serta Persia bisa hidup berdampingan dengan suku dan agama lain karena mereka melihat pentingnya belajar mewujudkan kehadiran gereja dalam lingkungannya ketimbang berharap untuk mengkristenkan seluruh masyarakat di sekitarnya. Mereka terus ditantang dan belajar memberikan kesaksian melalui hidup dan tindakannya.

Memang tidak dipungkiri bahwa situasi kekristenan di Barat agak berbeda. Sejak Konstantinus menjadi kaisar di kerajaan Romawi agama Kristen menjadi agama negara, dan pada abad sesudahnya terjadilah kristenisasi masyarakat di sekitarnya seperti misalnya di Jerman, Prancis, Slavia dan Rusia. Kendatipun dalam sejarah misioner perjumpaan kekristenan dengan budaya dan agama tradisional kerap menimbulkan ketegangan, namun gereja tetap berkeyakinan bahwa kemajemukan bukanlah menjadi ancaman bagi persatuan iman kepada Yesus Kristus. Hal ini misalnya tampak dalam sikap positif Gereja Katolik pada abad 16 dan 17 terhadap kebudayaan dan agama-agama lain. Perjumpaan dengan agama dan kebudayaan lain membuat para misionaris mengambil sikap menyapa dan merangkul. Nama-nama seperti Matteo Ricci di Cina, Valignano di Jepang, De Nobili di India, Yustinus de Yakobis di Ethiopia, dll merupakan contoh tokoh yang menampilkan sikap positif terhadap kebudayaan dan kepercayaan bangsa lain. Sikap positif mereka menguatkan bahwa iman Kristen tidak eksklusif. Iman Kristen tidak mengucilkan apa yang baik dan suci dari agama dan budaya lain. Hal ini merupakan dasar sikap multikulturalisme dalam kekristenan.

Sikap Gereja Katolik terhadap budaya dan agama lain kemudian ditegaskan oleh Kongregasi untuk Penyebaran Iman (*Propaganda Fide*) yang menggariskan norma-norma bagi para uskup asal Eropa yang mengabdikan di Asia. Norma itu antara lain menegaskan untuk tidak memaksa umat mengubah ritus asli mereka, kebiasaan budaya mereka, dan cara hidup khas milik mereka, kecuali bila jelas-jelas bertentangan dengan ajaran moral dan agama. Juga ditegaskan agar

tidak membuat “cangkakan” budaya serta kebiasaan memunculkan budaya baru seperti Perancis-Cina, Spanyol-Filipina, Portugis-Indonesia, dst. Budaya asli harus dipertahankan dan dihargai, karena dapat mengarah pada benih-benih keselamatan.⁴²

Secara teologis prinsip-prinsip dasar dan ajaran Gereja Katolik khususnya sesudah konsili Vatikan II pada hakekatnya sangat mendukung konsep multikulturalisme ini. Konstitusi Dogmatik tentang Gereja *Lumen Gentium* (LG) artikel 16 menegaskan segala sesuatu yang baik dan benar di luar iman Kristen dipandang oleh Gereja sebagai “persiapan Injil” (*preparatio Evangelica*⁴³) yang diberikan oleh Allah untuk menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Mereka yang bukan karena kesalahannya sendiri tidak mengenal Injil Kristus dan GerejaNya, tetapi berusaha mencari Allah dan bertindak seturut kehendakNya lewat suara hatinya, tetap memperoleh keselamatan abadi.

Konstitusi Pastoral Gereja di dalam dunia dewasa ini *Gaudium et Spes* (GS) artikel 22 menggarisbawahi panggilan manusia sebenarnya satu, yaitu panggilan ilahi. Karena Kristus wafat untuk semua orang (Rm 8, 32), maka kita harus yakin bahwa Roh Kudus memberikan *kemungkinan* kepada semua orang untuk bergabung dalam Misteri Paska dengan cara yang diketahui oleh Allah.

Deklarasi Sikap Gereja terhadap Agama-agama bukan Kristen *Nostra Aetate* (NA) merupakan pertanggungjawaban historis dan teologis Gereja terhadap agama-agama bukan Kristen. Dalam NA 1 Gereja mengungkapkan pembaharuan pandangannya terhadap fenomena “zaman kita” (*nostra aetate*) yang menonjolkan pluralisme agama di satu pihak dan persatuan bangsa manusia menjadi satu masyarakat di lain pihak. Selanjutnya NA 2 menekankan Gereja

42 F.X.Armada Riyanto, *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*, Kanisius, 1995, hal. 25.

43 Istilah “persiapan Injil” (*preparatio Evangelica*) dicetuskan pertama kali oleh Eusebius dari Cesarea. Istilah ini kiranya bukan pertama-tama paham teoretis yang merangkum segala sesuatu dari agama-agama lain, tapi dimaksudkan sebagai paham konkret tentang apa yang baik, benar dan suci dari agama-agama lain.

Katolik tidak menolak apa pun yang benar dan suci dalam agama-agama.⁴⁴

Dokumen LG 16, GS 22 dan NA 1-2 mengungkapkan langkah maju Gereja Katolik untuk keluar dari dirinya dan terlibat dalam dunia, berdialog dengan semua bangsa manusia. Di satu pihak Gereja bicara mengenai maksud keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, dan di pihak lain Gereja ingin bicara dengan semua orang sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dunia. Segi ini sungguh meneguhkan gagasan multikulturalisme.

2. Multikulturalisme di Indonesia

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, kebudayaan dan keyakinan agama yang beragam. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh dua kenyataan, yaitu kemajemukan agama dan kebudayaan yang mencolok. Pluralitas agama di Indonesia dapat digambarkan dengan menunjuk pada keberadaan agama-agama yang diakui resmi seperti: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu, dan ratusan agama suku serta aliran kepercayaan yang dianut oleh sebagian warga negara Indonesia. Bahkan menurut Junus Melalatoa dalam bukunya *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, di Indonesia saja ada sekitar 931 suku bangsa yang berbeda. Selain suku bangsa yang beragam, masyarakat Indonesia tinggal di dua wilayah pedesaan (*rural*) dan perkotaan (*urban*) dengan jenis pencaharian yang berbeda. Orang desa umumnya memiliki mata pencaharian sebagai peladang, petani bersawah, atau nelayan. Sementara warga perkotaan kebanyakan berprofesi pedagang, buruh, pegawai, atau pengusaha. Dari pulau ke pulau, bahkan dalam pulau yang sama, terdapat berbagai bahasa yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh adat istiadat yang berbeda dari satu suku bangsa ke suku bangsa yang lain, serta pengaruh dari agama yang berlainan pula.

44 F.X. Armada Riyanto, *op. cit.*, hal. 54.

Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia benih-benih multikulturalisme sebetulnya telah ada sejak dahulu, karena negeri ini terdiri atas beraneka ragam suku bangsa seperti yang terangkum dalam semboyan “*bhinneka tunggal ika*” (walau berbeda-beda, tapi tetap satu). Suku-suku bangsa bagaikan sebuah mozaik yang hidup berdampingan secara damai. Pengaruh sejarah kebudayaan yang beraneka ragam yang dialami penduduk Indonesia selama berabad-abad telah menambah keanekaragaman budaya di berbagai daerah di Indonesia.

Gejala keanekaragaman kebudayaan Indonesia pada masa sekarang ini merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari. Kita tidak perlu menutupi keanekaragaman ini. Justeru kita mesti menerimanya dengan akal sehat, karena dengan menerima keanekaragaman kita belajar memupuk kesatuan bangsa. Kita belajar menghargai semua variasi kebudayaan serta mencoba mengerti sebanyak mungkin aneka ragam manusia dan kebudayaan Indonesia.⁴⁵

Bangsa Indonesia perlu bangga dan bersyukur dengan kemajemukan budaya yang dimiliki oleh berbagai etnis, karena hal ini menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa yang perlu dipelihara. Namun kemajemukan ini sekaligus menjadi tantangan besar. Masalah-masalah akibat keanekaragaman pasti akan timbul, antara lain konflik antar suku, seperti yang pernah terjadi antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan. Ada konflik agama dan kepercayaan di Poso, serta masalah kelompok mayoritas dan minoritas dengan perlakuan tidak adil terhadap etnis Tinghoa. Beberapa tahun terakhir masalah tersebut sering terjadi di Indonesia dan sangat mempengaruhi integritas nasional. Maka, salah satu sifat yang berbahaya dalam sebuah masyarakat yang beranekaragam adalah primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Orang akan semakin eksklusif bila dia mengidentifikasi dirinya hanya dengan salah satu unsur primordial saja. Sifat seperti ini mesti dihindari dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Mozaik kebudayaan sebagai representasi dari gambaran

45 Yuni Sare/Petrus Citra, *Antropologi*, Grasindo, 2007, hal. 42.

multikulturalisme di Indonesia (sebagaimana telah dibahas diatas), mestinya hidup tidak hanya sekedar berdampingan secara damai, melainkan bisa merajut berbagai serpihan kebudayaan secara dinamis, saling menghargai dan mampu membangun kebersamaan tanpa mengeliminasi perbedaan. Ini merupakan satu tugas yang mendesak untuk diperhatikan secara serius oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia.

Dengan memperhatikan prinsip dasar multikulturalisme dan dikaitkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, menjadi jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan, karena justru kebijakan ini mampu memaknai prinsip “bhinneka tunggal ika” secara baik, seimbang dan proporsional. Dengan kebijakan ini juga salah satu sila dari Pancasila “persatuan Indonesia” dapat terwujud, dan sekaligus mengembangkan semangat nasionalisme. Multikulturalisme juga memperkaya konsep kerukunan hidup umat beragama.

Lalu, apa kaitan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia dengan penyuluhan agama Katolik?

3. Penyuluhan agama Katolik dalam konteks masyarakat multikultural

Tidak boleh disangkal bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk/multikultural merupakan suatu keniscayaan. Maka, keadaan ini mesti menjadi perhatian serius dalam penyuluhan agama Katolik. Artinya, para penyuluh perlu menyadari multikulturalisme/kemajemukan bukanlah merupakan suatu ancaman dalam proses penunaian tugasnya, tapi malah menjadi pendorong kreativitas dalam berkarya. Sebelum mengulas bagaimana mempersiapkan penyuluhan agama Katolik dalam konteks masyarakat multikultural/majemuk, perlu lebih dahulu diberi pengertian dasar “penyuluhan” itu sendiri, yang dalam bahasa teologis kristiani tidak lain adalah “pewartaan” Kabar Gembira (evangelisasi).

a. Pengertian dasar “penyuluhan” sebagai “pewartaan”

Secara umum pengertian “penyuluh agama” menurut Keputusan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa “penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama”. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 79 tahun 1985 bahwa keberadaan penyuluh agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lain: (1) penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat, (2) penyuluh agama sebagai panutan, (3) penyuluh sebagai penyambung tugas pemerintah.

Lalu Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53/Kep/MK.Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan bahwa dalam kegiatan tugas penyuluhan agama, melekat fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi *informatif* dan *edukatif*: penyuluh agama memposisikan diri sebagai pribadi yang wajib mewartakan, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. (2) Fungsi *konsultatif*: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. (3) Fungsi *advokatif*: penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan ajaran, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Bertolak dari definisi penyuluh agama, serta peran dan tugas pokoknya dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan, maka dalam bahasa teologis gerejani penyuluh agama Katolik itu tidak lain adalah seorang “pewarta” dan penyuluhan yang diberikan itu merupakan suatu bentuk “pewartaan” Kabar Gembira (evangelisasi). Apa yang dilakukan oleh para penyuluh agama Katolik sebetulnya juga merupakan perwujudan panggilannya sebagai awam “yang dengan baptisannya menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan Umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, dan karena itu sesuai dengan peranan mereka masing-masing menjadikan perutusan seluruh umat kristiani di dalam Gereja dan dunia” (LG 31).

Yang menjadi tantangan bagi para penyuluh agama Katolik adalah menyadari bahwa tugas penyuluhan yang mereka lakukan memiliki makna ganda, selain melaksanakan tugas negara (“memberikan bimbingan, penerangan dan motivasi pada masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan melalui pendekatan keagamaan dan bahasa agama”), tetapi juga sekaligus mewujudkan panggilannya sebagai awam mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus sebagai imam, nabi dan raja di dalam gereja dan dunia. Karena peranan strategis ini (mengkomunikasikan ajaran agama dan program pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat) para penyuluh agama mesti selalu meningkatkan kompetensinya dari waktu ke waktu, terutama dalam hal ini kemampuan memberikan penyuluhan agama yang sesuai dan relevan bagi masyarakat majemuk/multikultural.

Proses penyuluhan agama (=“pendalaman iman”) pada intinya merupakan usaha pendampingan dan pendalaman untuk meningkatkan mutu hidup beriman. Upaya tersebut diusahakan dengan aneka metode, situasi, dan suasana yang dikembangkan oleh para penyuluh agar umat merasa ditumbuhkan pengolahan imannya baik pengetahuan maupun sikap hidupnya dalam beriman.⁴⁶ Dengan

46 Purwono Nugroho Adhi, “Avant Gardist Katekese. Menggagas Kreatifitas dan Ruang

demikian, prinsip penyuluhan hendaknya lebih sebagai usaha untuk menciptakan situasi dan suasana hidup beriman sedemikian rupa, sehingga membantu dan mendukung tumbuh kembangnya iman umat baik secara kognitif, afektif dan perilaku dalam menghayati apa yang diimaninya. Situasi dunia dan cara pandang (*world view*) manusia yang kompleks membawa implikasi serius bagi proses penyuluhan agama. Penyuluhan ditantang pada kemajuan cara berpikir, bertindak, dan menginternalisasi makna serta berbagai perubahan mendasar menyangkut orientasi cara pandang. Penyuluhan harus merujuk pada konsekwensi logis implikasi dan berbagai perubahan perilaku, sikap, dan tata budaya.⁴⁷

b . Penyuluhan agama dalam konteks masyarakat multikultural

Bila kita sepakat bahwa penyuluhan agama di lingkungan Kementerian Agama Bimas Katolik merupakan salah satu bentuk pewartaan Kabar Gembira atau dalam bahasa teologis “pendalaman iman”, maka kita mau menganalisa faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjalankan penyuluhan agama dalam konteks masyarakat majemuk/multikultural.

Dalam proses penyuluhan agama Katolik, ada dua unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu segi *isi* dan *suasana* penyuluhan. Isi memuat proses edukatif dan konsientisasi mengenai visi dan pengetahuan iman dan pesan moral bagi peserta. Isi penyuluhan tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya atas suasana, baik faktor perkembangan psikologis peserta penyuluhan itu sendiri dan aspek-aspek eksternalnya, yaitu lingkungan, sarana, pendekatan dan metodenya. Maka dibutuhkan suasana akomodatif yang mampu menghantar isi kepada peserta penyuluhan. Suasana tanpa isi akan membuat proses penyuluhan hanya sekedar ruang hiburan, tapi isi

Alternatif dalam Katekese” dalam <http://purwonomedia.wordpress.com/> yang diakses pada 16 April 2010 pukul 13:14.

47 *Ibid.*

tanpa suasana juga akan membuat proses penyuluhan bagaikan ruang ceramah yang membosankan dan sama sekali tidak efektif bagi peserta. Untuk itu segi isi dan suasana menjadi bagian yang tak terpisahkan. Isi penyuluhan harus sejalan dengan suasana, begitu juga suasana mesti memuat isi yang membangun iman peserta penyuluhan.⁴⁸

Karena metodologi penyuluhan pada intinya adalah pengembangan hidup beriman umat, maka metodenya mesti terbuka pada pengetahuan yang bersifat edukatif, dan proses komunikasi yang memperhitungkan berbagai pendekatan yang mendukung, misalnya 3 komponen *multitasking* yang meliputi aspek *visual*, *auditori* dan *kinestetik* (gerakan). Penyuluhan harus memperhitungkan dan menyesuaikan diri dengan bahasa visual, auditori dan kinestetik. Media visual, auditori dan kinestetik menjadi salah satu jembatan untuk menghubungkan realitas dan cita rasa kepada inti visi kristiani. Hal itu lebih merupakan proses sintesa antara media dan penyuluhan dengan perkembangan budaya dan teknologi yang mempengaruhi umat berkaitan dengan gaya hidup dan berbagai kemajuan cara berpikir lengkap dengan progresifitas pendekatannya.⁴⁹

Mengadaptasi gagasan Franz Magnis Suseno⁵⁰ mengenai arah ketekese di Indonesia, disini mau digarisbawahi beberapa unsur penting yang bisa diterapkan dalam penyuluhan agama Katolik. *Pertama*, iman injili yang mau diwartakan melalui penyuluhan hendaknya diajukan bukan sebagai sesuatu “yang perlu” atau “wajib”, melainkan sebagai sesuatu yang mengasyikkan, menggembirakan, yang memberikan semangat, kekuatan, kualitas baru kepada hidup, yang menjanjikan terpenuhinya cita-cita dan harapan yang paling luhur. Penyuluhan agama harus menyemangati iman dan seluruh paket hidup dalam Gereja sebagai sesuatu yang

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*

50 Franz Magnis-Suseno, *Beriman dalam Masyarakat. Butir-butir Teologi Kontekstual*, Kanisius, 1993, hal. 167-174.

menarik. Maka iman jangan dikemukakan sebagai seperangkat hukum dan peraturan yang mesti dilakukan secara terpaksa. Yang menentukan bukan adanya aturan atau tidak, melainkan bagaimana aturan itu dihayati sebagai sesuatu yang mengancamkah atau sebagai ungkapan kemantapan hati dalam kehidupan iman?

Kedua, hal ini amat relevan dengan konteks masyarakat multikultural/majemuk, apakah penyuluhan agama yang dilaksakan mendorong umat untuk lebih terbuka atau sebaliknya menjadi penganut relativisme? Artinya, sejauh mana penyuluhan agama mampu memberdayakan warga Katolik yang mungkin menjadi golongan minoritas bisa menjadi garam dan bukan ghetto di masyarakat? Dampak adanya umat Kristus dalam masyarakat yang majemuk mesti seperti pancaran sinar lilin, sebagai kuman penyembuh yang mencairkan apa yang keras dan menghidupkan kembali apa yang lumpuh dalam masyarakat. Maka, penyuluhan agama merangsang umat lebih mampu berdialog. Kemampuan berdialog, menurut Magnis-Suseno, mengandaikan dua hal: Kemampuan identitas dan kepercayaan diri, dan hormat terhadap lawan dialog, jadi harus bebas dari sikap memandang rendah kepadanya. “Tetapi sekaligus kita percaya bahwa Allah menyatakan diri secara defenitif, lengkap dan otentik dalam manusia Yesus Kristus, Tuhan kita.”⁵¹ Bila umat kita mau menjadi garam, harus ada semangat yang mau mengubah lingkungan dan untuk itu umat memang boleh menghormati pandangan pihak lain, tapi sekaligus yakin bahwa iman kita adalah dasar yang sebenarnya bagi kita untuk bertindak dalam masyarakat. Maka, ucapan “semua agama sama saja” (*relativisme*) bertentangan dengan iman pada pribadi Yesus Kristus.

Dalam konteks masyarakat multikultural penyuluh agama Katolik ditantang bagaimana merancang materi penyuluhan secara kreatif sehingga umat memiliki keterbukaan bagi dialog dengan pihak di luar Gereja, tanpa eksklusivisme, dan dengan mengakui

51 *Ibid.*, hal. 169.

kebaikan yang ada pada mereka di satu pihak, dan di lain pihak suatu keyakinan bahwa bagi saya iman saya adalah yang paling baik dan paling betul karena ia memang berdasarkan wahyu Allah.

4. Apa yang bisa dilakukan para penyuluh dalam konteks Masyarakat kita yang majemuk?

Dalam tataran konseptual dan praksis para penyuluh perlu menyadari beberapa aspek berikut ini:

- 1) Fakta kemajemukan/multikulturalisme merupakan dimensi yang inheren dari kemanusiaan dan juga adalah kekayaan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Jika kita yakin bahwa Tuhan adalah asal dari seluruh ciptaan, kita pun bisa menyimpulkan bahwa kemajemukan atau kebhinekaan ciptaan merupakan bagian dari rancangan Tuhan. Bila kita mampu memandang kemajemukan sebagai unsur hakiki dalam penciptaan, agaknya kita akan mampu memandang kemajemukan iman dan tindakan manusia dengan rasa nyaman.⁵² Penerimaan terhadap kemajemukan tidak dimaksudkan untuk mengorbankan pertimbangan-pertimbangan kritis. Menerima kemajemukan berarti secara esensial memahami dan menerima keunikan sendiri dan mempunyai pemahaman yang mendalam tentang interaksi antar iman dan antar budaya, serta mampu mengartikulasikan suatu tujuan yang lebih luhur dari sekedar melestarikan eksistensi masing-masing. Penyuluhan agama perlu menangani masalah kemajemukan/multikulturalisme secara serius.⁵³

Namun tidak bisa disangkal, bahwa masih kerap dilakukan pengabaian agama/iman dan budaya lain dalam penyuluhan. Atau, kadang membahas agama dan kebudayaan lain lebih dahulu untuk pada akhirnya menjelaskan superioritas agama/iman Kristen. Pendekatan seperti ini jelas tidak mendukung

52 Kadarmento Hardjowasito, *op.cit.*, hal. 114-115.

53 *Ibid.*, hal. 116.

dan mengembangkan kemampuan peserta penyuluhan untuk merelasikan dirinya secara positif pada mereka yang beragama lain. Seharusnya penyuluhan tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, misalnya topik mengenai Tuhan dan hakekat manusia. Bagaimana hal itu menurut sudut pandang Kristen, lalu mengulas juga bagaimana agama/iman lain memandang topik yang sama dari sudut pandang masing-masing. Proses ini akan menolong peserta penyuluhan untuk melihat kekhasan paham iman Kristen, serentak belajar dari cara pandang agama/iman lain. Tujuannya, membantu warga Kristen memiliki identitas dan komitmen yang jelas, namun sekaligus tidak mengorbankan kemampuan untuk hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat yang sangat majemuk secara positif.⁵⁴

Para penyuluh agama bisa juga misalnya mengajak peserta penyuluhan untuk mensyukuri kemajemukan bukan semata-mata sebagai hal yang menarik, melainkan juga sebagai sumber yang bermanfaat untuk kelestarian seluruh ciptaan. Contohnya, tema mengenai masalah lingkungan hidup. Penyuluh bisa mengajak peserta penyuluhan untuk melihat bahwa setiap agama dan budaya mempunyai pandangan sendiri mengenai alam dan dunia sekitar. Setiap agama/iman/keyakinan mempunyai nilai dan sikap yang peduli pada alam dan penyuluhan diharapkan mampu mengubah sikap peserta untuk lebih mencintai dan melestarikan alam. Lalu ditekankan bahwa hanya dengan dukungan dan kerja sama semua lapisan masyarakat yang majemuk itu usaha pelestarian lingkungan hidup akan bisa tercapai.

- 2) Pada prinsipnya, penyuluhan agama yang dilaksanakan dalam konteks masyarakat multikultural pertama-tama bertujuan membangun perilaku multikultural sebagai habitus di antara warga. Habitus dipandang sebagai hidup yang berwujud dan bukan sebagai suatu ideologi atau indoktrinasi. Habitus

54 *Ibid.*, hal. 117.

dibentuk dan membentuk kondisi-kondisi sosio-kultural yang melingkupi manusia. Habituaasi multikultural ini mengajak peserta penyuluhan untuk bertransformasi dengan keadaan nyata sekarang sambil memperhatikan nilai-nilai di balik faktisitas multikultural.⁵⁵ Pembentukan habitus ini dapat diwujudkan, antara lain, melalui jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal seperti misalnya penyuluhan, seminar atau diskusi. Pendidikan multikultural memprioritaskan nilai dasar persaudaraan, perukunan kembali (rekonsiliasi) dan kesetiakawanan sosial. Penyuluhan agama yang dibangun dalam cahaya perbedaan dan kemajemukan diharapkan lambat-laun akan melahirkan pribadi dan masyarakat majemuk yang saling menghargai, menghormati dan setia kawan.⁵⁶

- 3) Setidaknya ada tiga prinsip pendukung multikulturalisme yang perlu mendapat penekanan dalam penyuluhan agama: (1) *Toleransi*, yang berarti menghargai perbedaan dengan pihak lain, (2) *Perdamaian*, karena dengan perdamaian beragam suku bangsa serta aneka macam karakteristiknya yang hidup bersama akan mendapatkan ketenangan dan keamanan. Hanya dalam situasi damai lah semangat multikulturalisme bisa bertumbuh. (3) *Keadilan*. Yang ditekankan disini ialah berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain. Ketiga prinsip toleransi, perdamaian dan keadilan merupakan prasyarat mutlak bila kita hendak mewujudkan multikulturalisme dalam masyarakat.
- 4) Menyangkut praksis metodologis: Masalah yang dihadapi berkaitan dengan upaya menuju masyarakat Indonesia yang multikultural memang sangat kompleks. Apakah para tenaga penyuluh agama sudah siap untuk itu? Tampaknya dibutuhkan pengkajian secara cermat mengenai kesiapan tersebut. *Pertama*,

55 William Chang, "Perilaku Multikultural sebagai Habitus" dalam John Liku Ada (Ed.): *Dialog antara Iman dan Budaya*, Komisi Teologi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Jakarta/Yayasan Pustaka Nusantara, 2006, hal. 182.

56 *Ibid.*, hal. 183.

apakah secara konseptual dan teoretis kita cukup mampu untuk melakukan penelitian dan analisis atas gejala yang menjadi ciri-ciri masyarakat Indonesia yang majemuk? Apakah kita mampu membuat suatu cetak biru (*blueprint*) penyusunan materi penyuluhan bagi warga dengan latar belakang masyarakat yang lebih bercorak multikultural? Bila belum, kiranya perlu persiapan melalui diskusi, seminar, lokakarya guna menambah khasanah pengetahuan dan mempertajam konsep dan metodologi yg relevan dalam kajian tentang masyarakat majemuk dan multikultural. *Kedua*, apakah secara metodologis kita sudah siap untuk melakukan langkah pertama diatas? Kajian etnografis tradisional yang bercorak *butterfly collecting* yang selama ini mendominasi penelitian para mahasiswa perlu ditinjau kembali dan dirobah sesuai dengan perkembangan ilmu antropologi dan disesuaikan dengan gagasan pembangunan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang multikultural. Penelitian etnografis model jurnalistik mesti diganti dengan penelitian etnografis terfokus dan mendalam, sehingga mampu mengungkap apa yang tersembunyi di balik gejala yang diamati. Pendekatan kualitatif etnografis perlu mendapat perhatian. *Ketiga*, perlu melakukan kajian multikulturalisme dan masyarakat multikultural secara interdisipliner. Artinya, kajian ahli antropologi dapat melibatkan ahli sosiologi, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dll, sehingga bisa bersama-sama melihat, mengembangkan dan menciptakan model-model penerapan multikulturalisme di Indonesia dari perspektif dan disiplin ilmu masing-masing.

Selain bekerjasama dengan para ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang menaruh minat pada multikulturalisme, para tenaga penyuluh agama hendaknya mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan serta pemerintahan yang dalam kebijaksanaan mereka langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah multikulturalisme.

BERPIJAK PADA REALITAS

tantangan pastoral, misiologi dan pendidikan agama kristen

- 5) Menyangkut penyusunan kurikulum, materi dan metode penyuluhan: Kurikulum penyuluhan agama berbasis multikultural misalnya adalah (1) Pluralisme masyarakat, (2) Kerjasama, Persaingan dan pertentangan, (3) Sejarah ras dan etnisitas, (4) Agama dan kebudayaan, (5) Agama dan ruang publik, (6) Penyatuan visi pluralitas. Sementara metode penyuluhan misalnya dapat berupa (1) Penyampaian cerita, riwayat atau kasus multikultural yang terintegrasi dalam berbagai penyuluhan tatap muka, (2) Merumuskan nilai-nilai multikultural dari setiap cerita atau kasus dalam tulisan atau artikel, (3) Menunjukkan sikap yang toleran dalam acara dialog, pertemuan, pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat, (4) Menulis skenario drama, film, atau cerpen yang mengandung nilai-nilai multikulturalisme.
- 6) Tahapan dalam merancang bentuk penyuluhan. Ada tiga tahap yang mesti dilalui bila kita ingin merancang penyuluhan agama yang berbasis pada masyarakat multikultural. *Pertama*, bersifat teologis. Perlu pemahaman teologis mengenai kemajemukan. Segala bentuk ketakutan atau kecurigaan pada kemajemukan mesti diganti dengan penerimaan bahwa Tuhan berkarya di dalam dunia. Perlu mengkaji ulang model penyuluhan yang selama ini mungkin memandang rendah ajaran budaya/agama lain. Materi kurikulum penyuluhan mesti digarap lebih sungguh-sungguh agar lebih mencerminkan dialog antar iman dan penerimaan kita atas multikulturalisme. Diharapkan di dalam diri peserta penyuluhan akan tercipta sikap positif kritis terhadap kemajemukan. Tahap *kedua* adalah menggariskan tujuan yang memadai untuk suatu masyarakat majemuk, antara lain misalnya (1) terwujudnya pelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan, (2) mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan upaya pemecahan segala bentuk konflik.⁵⁷ Tahap *ketiga*, menyusun desain penyuluhan dan unsur-unsur

57 *Ibid.*, hal. 120-121.

pendukungnya. Dalam desain perlu jujur terhadap posisi teologis yang dianut. Kemudian desain perlu memperhatikan posisi peserta penyuluhan (apakah anak-anak, remaja, orang dewasa, tingkat pendidikan, profesi, latar belakang, kebutuhan khusus). Selanjutnya perlu mengamati proses dengan memperhatikan tujuan sebagai indikatornya. Misalnya tujuan penyuluhan adalah membangun kreativitas, maka dalam proses penyuluhan mesti ada ruang/tempat untuk mengungkapkan kreativitas. Pendekatan penyuluhan dengan menekankan unsur penalaran (kognitif) saja tidak akan selalu menyelesaikan masalah. Barangkali perlu juga menghidupkan kembali pendekatan cerita (naratif) dalam penyuluhan.⁵⁸

58 *Ibid.*, hal. 122.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Armada Riyanto, F.X. *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Bhiku Parekh: *Rethinking Multiculturalism. Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Firman Nugraha, “Wawasan Multikultural dalam Penyuluhan Agama”, dalam: <http://firman-nugraha.blogspot.com/2010/03/wawasan-multikultural-dalam-penyuluhan.html> pada Jumat, 16 April 2010 pukul 10.44 WIB.
- Franz Magnis-Suseno, *Beriman dalam Masyarakat. Butir-butir Teologi Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hans-Joachim Hoehn, “Multikulturelle Gesellschaft” dalam Walter Kasper et.al. (ed.): *Lexikon fuer Theologie und Kirche*, Freiburg. Basel.Wien: Herder 2006, hal. 519-520.
- Hikmat Budiman (ed.), *Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005.
- Kadarmanto Hardjowasito, “Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam Konteks Masyarakat yang Majemuk”, dalam: Robert P. Borrong (Ed.) *Berakar di dalam Dia dan Dibangun di atas Dia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hal. 107-123.
- Purwono Nugroho Adhi, “Avant Gardist Katekese. Menggagas Kreatifitas dan Ruang Alternatif dalam Katekese” dalam <http://purwonomedia.wordpress.com/> yang diakses pada 16 April 2010 pukul 13:14.
- William Chang, “Perilaku Multikultural sebagai Habitus” dalam John Liku Ada (Ed.): *Dialog antara Iman dan Budaya*, Jakarta: Komisi Teologi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)/Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2006, hal. 175-184.
- Yuni Sare/Petrus Citra, *Antropologi*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Vatikan II, *Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. R. Hardowirjono), Jakarta: Obor, 1999.

SUMBER NASKAH

1. *Kemiskinan dan Kesetiakawanan* dalam: *Harian Batak Pos*. 3 April 2008.
2. *Krisis Pangan dan Mentalitas Kekuasaan* dalam: *Harian Batak Pos* 3 Februari 2008.
3. *Kontroversi RUU Pornografi* dalam: *Harian Batak Pos* 19 September 2008.
4. *Penanganan Integratif Anak Jalanan* adalah tulisan yang belum pernah dipublikasikan.
5. *Hubungan Teologi Akademis dan Pelayanan Gereja* dalam: *Jurnal Proklamasi* No. 10/Vol. 8/ Mei 2009.
6. *Tantangan Pastoral atas Fenomena Begu Ganjang* dalam: *Mingguan HIDUP* vol. 62 no. 36, September 2008, hal. 8.
7. *Spe Salvi dan Kita* dalam: *Mingguan HIDUP* vol. 61 no. 52 Desember 2007, hal. 10.
8. *Analisis Kurikulum Program Studi S1 Misiologi* adalah makalah yang disampaikan pada Konsultasi Penyusunan Silabus Kurikulum Misiologi yang dilaksanakan pada tanggal 16 -19 Juli 2010 di Hotel Lembah Nyiur km 79 Cisarua, Bogor, Jawa Barat oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
9. *Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Berbasis KTSP Tinjauan Teologis* adalah materi pada Konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Pendidikan Kristen Tingkat Dasar yang dilaksanakan di Puncak, Bogor pada 1-4 September 2010 oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
10. *Pemanfaatan TIK dalam PAK* adalah makalah yang disampaikan pada Pertemuan Guru Agama Kristen di Hotel Puncak Raya Cisarua, Bogor pada 15 Juli 2010 yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI.

11. *Penyuluhan Agama dalam Konteks Masyarakat Multikultural* adalah bahan ceramah dalam rangka Kegiatan Pertemuan Pembinaan Penyuluh Agama Katolik Regio Sulawesi yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 Mei 2010 di Manado Sulawesi Utara oleh Bimas Katolik Kementerian Agama RI.

BIODATA PENULIS

Dr. Raja Oloan Tumanggor lahir di Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) pada tanggal 14 April 1967. Pendidikan S1 dalam bidang filsafat diselesaikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik St. Thomas Medan, dan pendidikan Post S1 bidang filsafat teologi di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) St. Yohanes Pematang Siantar pada 1996. Pendidikan S3 bidang teologi diperoleh dari Westfaelische Wilhelms-Universitaet (WWU) Muenster, Jerman pada 2006. Sejak 2007-2011 mengajar misiologi dan teologi kontekstual di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta. Sejak 2007 hingga 2012 mengajar Filsafat Ilmu dan Logika, serta Filsafat Umum di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta, dan sejak 2012 hingga sekarang menjadi dosen tetap mata kuliah Filsafat Umum untuk program S1 dan Filsafat Ilmu Pengetahuan untuk program S2 di fakultas dan universitas yang sama. Ia juga menjadi dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi swasta, antara lain dosen Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) bidang Logika di Unika Atmajaya Jakarta, dan Universitas Bina Nusantara (Binus) bidang *Character Building*. Beberapa tulisannya pernah dimuat di majalah Mingguan *HIDUP* (Jakarta), *Harian Sinar Indonesia Baru* (Medan). Karyanya yang sudah diterbitkan antara lain: “*Die Inkulturation des christlichen Glaubens aus einer indonesischen Perspektiven. Das Beispiel der Toba-Batak auf Nord-Sumatera*” dalam: Arnd Buenker/Ludger Weckel (Hg): *Ihr Werdet meine Zeugen sein* (Freiburg-Basel-Wien, 2005), *Logika Sebuah Pengantar* (Penerbit: PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012).